

SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI DAN *INDEPENDENCE THREATS*
AUDITOR TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR
PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM
MENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*)
DI BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

AMIRUDDIN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI DAN *INDEPENDENCE THREATS* AUDITOR TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*) DI BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**AMIRUDDIN
A31112025**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI DAN *INDEPENDENCE THREATS* AUDITOR TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*) DI BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

**AMIRUDDIN
A31112025**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

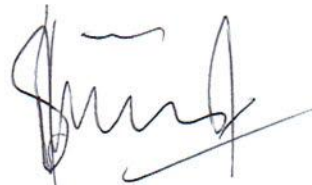
Makassar, 16 Maret 2017

Pembimbing I



Drs. Mushar Mustafa, Ak., MM., CA.
NIP 19510930 198303 1 001

Pembimbing II



Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si., CA.
NIP 19761105 200701 2 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650925199002 2 001

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI DAN *INDEPENDENCE THREATS* AUDITOR TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*) DI BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

**AMIRUDDIN
A31112025**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **13 April 2017**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
1.	Drs. Mushar Mustafa, Ak., MM., CA	Ketua	1.....
2.	Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2.....
3.	Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3.....
4.	Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4.....
5.	Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA	Anggota	5.....



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

nama : Amiruddin
NIM : A31112025
departemen/program studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH KOMPETENSI DAN *INDEPENDENCE THREATS* AUDITOR
TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT
INVESTIGATIF DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*)
DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 2017
Yang Membuat Pernyataan



Amiruddin

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan *Independence Threats* Auditor terhadap Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan”, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program Strata Satu (S-1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah untuk nabi Muhammad SAW penunjuk segala laku dan ucap bagi umatnya.

Proses penyusunan skripsi ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin berterima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada:

1. Kedua Orang tua peneliti. Aji dan Umming, yang peneliti sangat yakini selalu mendoakan meskipun tak pernah terlisankan.
2. Om dan tante peneliti. H. Yasir, S.E., M.M., Ak. dan Hj. Nurleli yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE, MS, Ak. CA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA. selaku ketua Departemen dan Sekertaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Drs. Mushar Mustafa, Ak., MM., CA selaku pembimbing I dan Ibu Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktunya memberikan bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kesediaannya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.

6. Bapak Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA, Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA dan Ibu Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA selaku penguji peneliti, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.
7. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas pengetahuannya selama proses perkuliahan terkhususnya Drs, H. Harryanto, Pgd.,Acc.,M.Com, Ph.D. selaku penasehat akademik peneliti.
8. Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Pak Aso, Pak Ical, Pak Bur, Pak Safar, Ibu Susi dan seluruh staf lainnya yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik. Terima kasih atas segala bantuannya.
9. Pimpinan, staf dan seluruh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas waktu dan kesempatan serta bantuan yang telah diberikan untuk melakukan penelitian. Terima kasih banyak atas kesempatan berharga yang diberikan.
10. Teman seperjuangan Idham, Thaibi, Sugi, Pa'le, Mamat, Fadel, Rizal, Daly, Arya, Ii, Hilda, Misna, Chiantal, Iffah, Heri, Sandy, Nue, Kana, Fathul, atas doa, motivasi, kebersamaan dan bantuan yang telah diberikan, jangan saling melupakan.
11. Keluarga besar PE12ENNIAL,qa Anita Holly, Lita, Gina, Eko, Ai', Iank, Chuse, Amel, Ria, Asra, Anti, Rahmat, Unna, Fitri, Hendra, Faiz, Pingkan, Lala, Laras, Elni, Dillah, Ammi, Kiko, Yaya, Putra, Priyo, Rahma, Ratna, Rosa, Sufe, Inggrid, Awal, Pita, Widar, aboy, Indah, dan Ichal.

12. Teman-teman pengurus Ikatan Mahasiswa Akuntansi periode 2014/2015 dan periode 2015-2016 serta keluarga besar KEMA FEB UH terkhususnya keluarga IMA FEB UH.
13. Kanda-kanda Blok J kak Aiman, kak Muklin, kak Haris Cool, kak Haris Komandan, kak Akbar, kak Uya, kak Anwar, atas waktu luangnya bermain takraw ataupun domino.
14. Pak Anwar yang senantiasa tak lelah mengantarkan makanan jika kami sedang lapar di Blok J. mama Aji dan mama Mala dikolong atas makanan dan kasih sayangnya. Terima kasih telah bersedia memberi kami makanan murah dan berkualitas sebagai penambah gizi bagi kami anak rantau.
15. Adik-adik Salsa, Feny, Ausi, Ratih, Agung, Juliana, Theo, Uland, Fitri, Icha Jkt, Sutami, Chandrika, Numuth, Sari, Agung, Ratih, Abi, Dede, Salman, Dira, Masita, Icha, Deti, Al, Fadhil, Opik, Dzakwan, Yayat, Denka, Arnold, Arni, Dita, Ria, Wito, Zulfa, Atikah, Pek, Hasbi, Bella, Hasrah, Mega, Dhea. Kalian sangat luar biasa.
16. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala doa dan bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya.

Makassar, 2017

Peneliti

ABSTRAK

**Pengaruh Kompetensi dan *Independence Threats* Auditor terhadap Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)
Di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan**

***The Influence of Competence and Independence Threats Auditor to Effectiveness Investigative Audit Procedure in Detecting Fraud
At BPKP Representative Government Auditor in
South Sulawesi Province***

Amiruddin
Muhsar Mustafa
Rahmawati HS

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti ada atau tidaknya pengaruh antara variabel kompetensi dan *independence threats* terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah 55 auditor sebagai responden yang bekerja di Kantor BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kausalitas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dengan media pengumpulan data melalui kuesioner yang dibagikan ke setiap auditor. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil pengujian parsial, kompetensi dan *independence threats* auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). (2) kompetensi dan *independence threats* auditor mempunyai pengaruh secara simultan terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif.

Kata Kunci : Kompetensi, *Independence Threats*, Kecurangan, Efektivitas Prosedur Audit Investigatif.

This research was conducted to examine whether any effects of competence and independence threats to effectiveness investigative audit procedures in detecting fraud. The subjects for this research were 55 auditors as a respondent who worked in BPKP Representative Government Auditor in South Sulawesi Province. The research method in this study is a causality. The data in this research was primary data and collected through questionnaire distributed to each auditors. The result of this research can be concluded that: (1) based on the partial test results, competence and independence threats of auditors are positive and significant impact on the effectiveness investigative audit procedure on the detection of fraud. (2) Competence and independence threats of auditors have simultaneous effect on effectiveness investigative audit procedure on the detection of fraud.

Keywords: Competence, *Independence Threats*, Fraud, Investigatif Audit Procedure.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Kognitif.....	11
2.1.2 Teori Atribusi.....	13
2.1.3 Konsep Auditing.....	15
2.1.3.1 Definisi Auditing	15
2.1.3.2 Jeni- jenis Auditor	16
2.1.3.3 Standar Auditing	17
2.1.4 Audit Investigatif.....	19
2.1.4.1 Definisi Audit Investigatif	19
2.1.4.2 Pendekatan Audit Investigatif	20
2.1.4.3 Pembuktian Audit Investigatif	21
2.1.4.4 Pelaporan dan Tindak Lanjut Audit Investigatif	23
2.1.5 Kompetensi.....	27
2.1.5.1 Definisi Kompetensi	27
2.1.5.2 Indikator Kompetensi	28
2.1.6 <i>Independence Threats</i>	29
2.1.6.1 Independensi	29
2.1.6.2 Klasifikasi Independensi.....	29
2.1.6.3 <i>Independence Threats</i>	30
2.1.7 Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif	32
2.1.8 Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	35
2.2 Kerangka Pemikiran	40
2.3 Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian	42
2.3.1 Penelitian Terdahulu	42
2.3.2 Hipotesis Penelitian	44

2.3.2.1	Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>)	44
2.3.2.2	Pengaruh <i>Independence Threats</i> Auditor Terhadap Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>)	46
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Rancangan Penelitian	49
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	49
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	49
3.3.1	Populasi Penelitian	49
3.3.2	Sampel Penelitian	50
3.4	Jenis dan sumber data	51
3.4.1	Jenis Data	51
3.4.2	Sumber Data	51
3.5	Teknik pengumpulan data	51
3.6	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	52
3.6.1	Variabel Penelitian	52
3.6.2	Definisi Operasional	52
3.7	Instrumen Penelitian dan pengukuran variabel penelitian	54
3.8	Metode Analisis Data	55
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	55
3.8.2	Uji Kualitas Data	55
3.8.2.1	Uji Validitas	56
3.8.2.2	Uji Reliabilitas	56
3.8.3	Uji Asumsi Klasik	56
3.8.3.1	Uji Normalitas	57
3.8.3.2	Uji Autokorelasi	57
3.8.3.3	Uji Multikolinieritas	57
3.8.3.4	Uji Heteroskedastisitas	58
3.8.4	Uji Hipotesis	58
3.8.4.1	Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	60
3.8.4.2	Pengujian Parsial	60
3.8.4.3	Pengujian Simultan	61
BAB IV HASIL PENELITIAN		
4.1	Deskripsi Data	63
4.2	Karakteristik Responden	63
4.2.1	Jenis Kelamin	63
4.2.2	Usia Responden	64
4.2.3	Pendidikan Terakhir Responden	64
4.2.4	Lama Bekerja Responden	65
4.2.5	Jumlah Penugasan Audit Responden	65
4.3	Analisis Statistik Deskriptif	66
4.4	Hasil Analisis Data	67
4.4.1	Hasil Uji Kualitas Data	67
4.4.1.1	Uji Validitas	67
4.4.1.2	Uji Reliabilitas	68
4.4.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	69
4.4.2.1	Uji Normalitas	69
4.4.2.2	Uji Autokorelasi	72
4.4.2.3	Uji Mulirikolinieritas	72
4.4.2.4	Uji Heteroskedastisitas	73

4.4.3 Hasil Uji Hipotesis	74
4.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi	75
4.4.3.2 Uji Parsial (Uji <i>t</i>)	75
4.4.3.3 Uji Simultan (Uji <i>F</i>)	77
4.5 Pembahasan Uji Hipotesis	78
4.5.1 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>)	78
4.5.2 Pengaruh <i>Independence Threats</i> Auditor Terhadap Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>)	81
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
5.3 Keterbatasan Penelitian	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 <i>Corruption Perception Index</i>	2
2.1 Penelitian Terdahulu	42
4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner.....	63
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	64
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	64
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	65
4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Penugasan Audit.....	65
4.7 Analisis Statistik Deskriptif	66
4.8 Uji Validitas	68
4.9 Uji Realibilitas	69
4.10 Uji <i>Kolmogrov-Smirnov</i>	71
4.11 Uji Autokorelasi	72
4.12 Uji Multikolinieritas	72
4.13 Uji Koefisien Determinasi	75
4.14 Uji Parsial (Uji <i>t</i>)	76
4.15 Uji Simultan (Uji <i>F</i>)	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Segitiga <i>Fraud</i>	38
2.2 Kerangka Pemikiran.....	42
4.1 Grafik Normal <i>P-Plot</i>	70
4.2 Grafik Histogram	71
4.3 Grafik <i>Scatterplot</i>	74

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Biodata	91
2. Kuesioner Penelitian	93
3. Frekuensi Skor Setiap Variabel.....	97
4. Hasil Uji Kualitas Data	100
5. Hasil Uji Asumsi Klasik	104
6. Hasil Uji Hipotesis	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang saat ini mengalami peningkatan kecurangan (*fraud*) secara terus menerus baik dari segi kualitas maupun kuantitas setiap tahunnya. Korupsi adalah salah satu bentuk kecurangan yang sangat sering terjadi di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan sangat meresahkan masyarakat.

Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik. Pada sektor swasta, banyak terdapat penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan seseorang dalam menafsirkan catatan keuangan. Hal itu menyebabkan banyaknya kerugian yang besar bukan hanya bagi orang-orang yang bekerja pada perusahaan, akan tetapi pada investor-investor yang menanamkan dananya pada perusahaan tersebut. Sementara itu pada sektor publik, di Indonesia korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Semenjak runtuhnya jaman orde baru, masyarakat menjadi semakin kritis dalam mencermati kebijakan-kebijakan pemerintah yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang dikenal dengan istilah KKN.

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan *patologi social* (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Kasus korupsi yang semakin berkembang di Indonesia mendorong pemerintah melakukan upaya pemberantasan dengan membentuk lembaga pemerintahan seperti BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bahkan dibuatnya UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance*.

Menurut *Corruption Perception Index* tahun 2015 dalam *Transparency Internasional* skor Indonesia adalah 36 dengan urutan ke 4, dari 7 negara ASEAN yang tercermin pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Corruption Perception Index (CPI)

<i>Rank</i>	<i>Country/territory</i>	<i>2015 Score</i>
1	Singapore	85
2	Malaysia	50
3	Thailand	38
4	Indonesia	36
5	Philippines	35
6	Vietnam	31
7	Myanmar	22

Sumber: *Transparency Internasional* 2015 (<http://www.ti.or.id/>) dengan pengolahan kembali

Secara regional Indonesia tidak banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan skor CPI-nya. Skor 36 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum bisa keluar dari situasi korupsi dan kecurangan yang sudah mengakar, meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan adanya progres pemberantasan korupsi di Indonesia, meskipun terkesan lamban. Oleh karena itu, *Transparency Internasional (TI)*-Indonesia mendorong perbaikan hukum, perkuat KPK, dan benahi layanan publik. Peningkatan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lepas dari upaya lembaga-lembaga independen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi

sebagai salah satu bentuk kecurangan (*fraud*) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Kasus yang terjadi di Jambi seperti yang dikutip dalam Kompas.com, bahwa seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Fitri Susanti, kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus tersebut menyatakan, setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini. Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Sitepu terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI. Ada empat kegiatan laporan keuangan milik Raden Motor yang tidak masuk dalam laporan keuangan yang diajukan ke BRI, sehingga menjadi temuan dan kegagalan pihak kejaksaan dalam mengungkap kasus kredit macet tersebut. (Selasa, 18/5/2010). Kasus ini memunculkan pertanyaan apakah auditor telah melaksanakan kode etiknya dengan baik atau tidak, apabila yang terjadi adalah auditor tidak mampu melaksanakan kode etik yang berlaku, maka inti permasalahannya adalah independensi dan tingkat pemahaman serta pengetahuan auditor tersebut dalam melaksanakan prosedur audit.

Kualitas audit yang dihasilkan dari prosedur pelaksanaan audit oleh akuntan publik menjadi sorotan setelah kasus PT. Kimia Farma yang melibatkan kantor akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) dalam Tempo.co.id bahwa kasus “kesalahan pencatatan” laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. tahun 2001, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena merupakan rekayasa keuangan dan menyesatkan publik. Kimia Farma diduga kuat melakukan mark up laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan tersebut,

Kimia Farma menyebut berhasil meraup laba sebesar Rp 132 miliar. Belakangan, belang Kimia Farma terkuak lebar. Perusahaan farmasi tersebut pada tahun 2001 sebenarnya hanya menjala untung sebesar Rp 99 miliar. Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM), diduga terlibat dalam aksi penggelembungan tersebut. Memang, belakangan Kimia Farma dan HTM mengoreksi laporan keuangan tersebut. Mereka beralasan telah terjadi “kesalahan pencatatan”. Sebuah alasan yang melanggar akal sehat masyarakat.

Konteks kasus laporan keuangan di atas, memunculkan pertanyaan apakah kesalahan pencatatan tersebut dapat dideteksi oleh akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi kesalahan pencatatan tersebut, maka inti permasalahannya adalah kompetensi atau kemampuan audit tersebut, tetapi jika yang terjadi adalah akuntan publik ikut mengamankan kesalahan pencatatan laporan keuangan tersebut, maka inti permasalahannya adalah independensi auditor tersebut.

Melaksanakan pengusutan tindak pidana di luar bidang hukum, pengadilan juga dapat dibantu oleh seorang yang ahli. Seorang ahli ekonomi yang dapat membantu dalam pengusutan tersebut adalah auditor dan bantuan yang dapat diberikan berkenaan dengan tindak pidana kecurangan (*fraud*) adalah audit investigatif. Audit investigasi berhubungan dengan pengujian dan analisis forensik dalam pengumpulan bukti dengan menggunakan teknik investigasi dan teknik-teknik audit yang kemudian digunakan dalam perkara pengadilan, oleh karena itu pada auditor investigasi diperlukan kualitas keterampilan dan keahlian khusus yaitu kombinasi antara auditor berpengalaman dan auditor penyelidik kriminal. (Karyono, 2013:127).

Audit investigatif berkembang di Indonesia secara perlahan dan digunakan juga untuk memecahkan berbagai kasus korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya hingga kini. Titik berat audit investigatif adalah upaya untuk penegakkan supremasi hukum terkait fraud yang muncul dengan metode investigasi. Di sektor publik bidang ini dicetuskan sebagai upaya untuk memerangi kecurangan atau korupsi. (Tuanakotta, 2007:198)

Istilah Audit Investigatif beberapa tahun belakangan ini sudah banyak didengar dan dibaca dalam berbagai media di ruang publik masyarakat Indonesia, setelah adanya permintaan dari DPR/ lembaga legislatif ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai upaya tindak lanjut hasil audit investigatif/ pemeriksaan khusus yang dilaksanakan sebelumnya terhadap kasus Bailout Bank Century. Fenomena *fraud* yang semakin marak saat ini terutama korupsi sebagaimana di laporkan oleh Wakil Ketua KPK bahwa dalam kurun waktu 2004 sampai Mei 2012, KPK telah berhasil membawa para koruptor kelas kakap ke Pengadilan Tipikor dan semuanya divonis bersalah yaitu 50 anggota DPR, 6 pejabat setingkat menteri, 8 gubernur, 5 wakil gubernur, 29 walikota dan bupati, seratus lebih pejabat pemerintah eselon I & II, 85 CEO, pemimpin perusahaan milik negara (BUMN), dan pihak swasta yang terlibat korupsi. Fraud merupakan kejahatan yang luar biasa, maka harus secara luar biasa pula penanganannya, dibongkar dan dituntaskan melalui teknologi forensik sehingga diperoleh alat bukti yang dapat diterima sistem hukum yang berlaku (Baso, 2012:8).

Seorang auditor investigatif harus didukung dengan kemampuan yang memadai untuk menunjang keberhasilannya suatu audit investigasi diantaranya memiliki pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental (Tuanakotta 2010:349). Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan setiap audit guna memperoleh kepastian yang layak bahwa

laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Tanggung jawab auditor untuk menemukan dan melaporkan kecurangan diatur dalam *Standard on Audit Statement (SAS) No. 82, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. Oleh karena itu, auditor harus memiliki kompetensi dan independensi yang tinggi dalam melakukan audit investigatif.

Membuktikan kecurangan (*fraud*) dibutuhkan pelaksanaan yang efektif melalui prosedur audit. Wahono (2011;1) menyimpulkan bahwa prosedur audit dimulai dengan tahap penelaahan informasi awal, perencanaan pemeriksaan investigatif, pelaksanaan pemeriksaan investigatif, pelaporan dan tindak lanjut. Adapun tahapan prosedur audit yang harus dilakukan yaitu prosedur analitik, menginspeksi, mengkonfirmasi, mengajukan pertanyaan, menghitung, menelusuri, mencocokkan ke dokumen, mengamati ulang, serta teknik audit dengan bantuan komputer. Prosedur audit tersebut harus dilaksanakan secara efektif agar dapat membuktikan adanya kecurangan dilembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah.

Audit pada instansi pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai auditor internal. Tugas BPKP adalah memberikan bantuan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memperbaiki sistem pengendalian manajemen antara lain meliputi kegiatan membangun sistem akuntabilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah serta penerapan *good public governance* dan *good corporate governance*. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada audit internal pemerintah, yaitu BPKP. Tugas BPKP adalah melakukan pengawasan dan audit, baik itu audit atas yang direncanakan oleh BPKP sendiri maupun atas permintaan pihak-pihak tertentu, misalnya pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BUMN/BUMD, dan institusi

pemberi pinjaman (*lender*). Tindak pidana kecurangan (*fraud*) yang semakin berkembang di Indonesia khususnya di bidang sektor publik mengharuskan lembaga independen seperti halnya BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dalam melakukan audit investigatif dituntut memiliki kompetensi serta pencegahan ancaman independensi dalam mengungkap kecurangan (*fraud*) dan menjadikannya sebagai alat bukti dalam pembuktian di bidang hukum.

Intansi pemerintah seperti halnya BPKP dalam membuktikan adanya penyimpangan atau kecurangan perlu dibantu oleh auditor investigatif yang melakukan suatu audit investigasi dimana seorang auditor harus memiliki kompetensi mendasar berupa pengetahuan prosedural dan pengalaman, selain itu seorang auditor harus memiliki sikap independen dalam melakukukan audit. Dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi dan sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak dengan mengumpulkan bukti-bukti. Selain itu efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif sangat diperlukan agar tujuan audit investigatif dapat tercapai secara efektif dimana auditor mempunyai tanggungjawab umum yang harus dipenuhi, diantaranya audit investigatif dilaksanakan oleh auditor yang secara bersama-sama mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi berdasarkan standar-standar pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian Masrizal (2010) dengan sampel auditor atau pemeriksa di Inspektorat Aceh diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan dan parsial pengalaman dan pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian. Serta penelitian Novianti (2014) dengan sampel auditor di Kantor Akuntan Publik Jakarta diperoleh kesimpulan bahwa

kompetensi dan *independence threats* berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini ingin menguji lebih lanjut pengaruh kompetensi dan *independence threats* auditor terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada objek dan waktu penelitiannya. Penelitian ini mengambil objek di BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan. Motivasi terbesar penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pendeteksian kecurangan (*fraud*) di sektor publik.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti kemudian melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi dan *Independence Threats* Auditor Terhadap Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah *independence threats* auditor berpengaruh terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah kompetensi dan *independence threats* auditor berpengaruh terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
2. Untuk mengetahui pengaruh *independence threats* auditor terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan *independence threats* auditor terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut.

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih menambah wawasan pengetahuan khusus di bidang auditing dan mengenai audit investigatif.
2. Sebagai sarana bagi penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja dan sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.
3. Memberikan tambahan wawasan bagi penulis terutama mengenai pengaruh kompetensi dan *independence threats* terhadap prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi para auditor investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam peranannya untuk mengungkapkan adanya tindak kecurangan yang terjadi di sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2012) yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik dari kegunaan teoretis maupun kegunaan praktis dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai berbagai teori dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, menguraikan secara ringkas mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisis data. Bab

IV Hasil Penelitian. Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek penelitian, analisis data, pengujian atas hipotesis penelitian dan pembahasan hasil pengujian hipotesis.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, saran-saran bagi pihak terkait serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang relevan dan dapat digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan, serta membantu dalam penyusunan instrumen penelitian.

2.1.1 Teori Kognitif

Teori kognitif memandang belajar sebagai proses yang memberi fungsi unsur-unsur kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah laku itu terjadi (Subini dkk,148). Teori kognitif menekankan bahwa aktivitas belajar manusia ada pada proses internal berpikir, yakni proses pengolahan informasi.

Colquit, LePine, dan Wesson (2011, 341) menunjukkan adanya lima tipe kemampuan kognitif sebagai berikut.

1. *Verbal ability*, berkenaan dengan berbagai kapabilitas berkaitan dengan pemahaman dan menyatakan komunikasi lisan dan tertulis.
2. *Quantitative ability*, berkenaan dengan dua tipe kapabilitas mate-matika yaitu *number facility* dan *mathematical reasoning*. *Number facility* adalah kapabilitas melakukan operasi matematika sederhana, menambah, mengurangi, mengkalikan dan membagi. Sedangkan *mathematical reasoning* merupakan kemampuan memilih dan mengaplikasikan formula untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut angka.

3. *Reason ability*, berkenaan dengan kumpulan kemampuan berbeda dengan pengertian dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan wawasan, aturan dan logika.
4. *Spatial ability*, merupakan dua kapabilitas dalam hubungannya dengan gambaran visual dan mental dan manipulasi dari objek dalam ruang. Pertama, *spatial orientation*, berkenaan dengan pemahaman yang baik tentang dimana sesuatu secara relat terhadap sesuatu yang lain dalam lingkungan. Kedua, *visualitation*, merupakan kemampuan melakukan imajinasi bagaimana sesuatu yang terpisah akan terlihat apabila ditempatkan bersama dengan cara tertentu.
5. *Perseptual ability*, berkenaan dengan menjadi dapat merasa, memahami, dan mengingat pola informasi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki pontensi untuk meningkatkan pengetahuan atas informasi yang diterima baik dari belajar atas inisiatif sendiri, belajar melalui internaksi sosial dan belajar melalui pengalaman sendiri. Kompetensi merupakan kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dan menggunakan pengalamannya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif dan obyektif. Menurut SPAP, PSA No.04, 2001, kompetensi terbagi dalam 4 (empat) komponen yaitu pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan.

Penelitian ini menggunakan teori kognitif sebagai dasar teori penelitian untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kompetensi auditor terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Pertimbangan auditor sangat tergantung dari persepsi mengenai suatu situasi. Aplikasi teori kognitif dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana auditor mengambil suatu pertimbangan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas audit khususnya audit investigatif. Kompetensi

seorang auditor dapat terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan. Setiap kali auditor melakukan audit maka auditor akan belajar dari pengalaman sebelumnya, memahami serta meningkatkan kecermatan dalam pelaksanaan audit. Auditor akan mengintegrasikan pengalaman auditnya dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Proses kognitif auditor inilah yang menjadi proses peningkatan keahlian auditor seperti bertambahnya pengalaman dan meningkatnya pengetahuan auditor dalam melakukan audit untuk mencapai efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan mengenai perilaku seseorang. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut telah berperilaku demikian yang disebabkan oleh situasi tertentu (Robbins dan Timothy, 2008,177). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll. ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa dengan hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap

atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Luthans dalam Hanjani (2014) mengemukakan bahwa “Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attribution*”. *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai dasar penelitian untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kompetensi dan *independence threats* terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa perilaku seseorang dapat disebabkan dari internal dirinya sendiri misalnya sifat, karakter, sikap, dan kemampuan. Sedangkan pengaruh yang disebabkan dari eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Berdasarkan teori atribusi kompetensi auditor adalah kemampuan dan pengalaman auditor dalam melakukan audit yang dapat terbentuk karena faktor internal yang dipengaruhi oleh kendali pribadi auditor dalam meningkatkan kemampuannya dan faktor eksternal karena situasi diluar dirinya yang dapat terbentuk karena pengalaman auditor dalam melakukan audit yang dapat meningkatkan kompetensinya.

Seorang auditor dalam melakukan audit laporan keuangan harus menjunjung tinggi independensi. independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Setiap kali auditor melakukan audit maka seorang auditor harus independen dan tidak boleh terpengaruh baik dari pihak internal maupun eksternal untuk mencapai efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan *fraud*.

2.1.3 Konsep Auditing

2.1.3.1 Definisi Auditing

Mulyadi (2002:9) mengatakan bahwa:

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Menurut Boynton *et al.* (2002:5) beberapa ciri penting yang ada dalam definisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Suatu proses sistematis.

Berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisasi.

b. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif.

Berarti memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka.

c. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi.

Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi disini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam

laporan keuangan yang umumnya terdiri dari lima laporan keuangan pokok: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

d. Menetapkan tingkat kesesuaian.

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikualifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.

e. Kriteria yang telah ditetapkan.

Standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan kriteria dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan legislatif, anggaran atau ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan oleh manajemen, GAAP yang ditetapkan oleh FASB, serta badan pengatur lainnya.

f. Penyampaian hasil

Diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan derajat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak audit.

2.1.3.2 Jenis-jenis Auditor

Jenis-jenis auditor menurut Messier, Glover, Prawitt, dan Douglas (2006:5) klasifikasi auditor terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Auditor eksternal (*external auditor*)

Sering disebut sebagai auditor independen atau bersertifikat akuntan publik (disingkat BAP atau *Certified Public Accounting-CPA*). Disebut eksternal atau independen karena mereka tidak dipekerjakan oleh entitas yang diaudit.

2. Auditor internal (*internal auditor*)

Auditor yang dipekerjakan oleh satu perusahaan persekutuan, badan pemerintah, individu, dan entitas lainnya. Institut Auditor Internal (*Institute of Internal Auditor IIA*) adalah organisasi utama yang mendukung auditor internal. Mereka dapat membantu auditor eksternal dengan audit laporan keuangan tahunan.

3. Auditor Pemerintah (*governance auditor*)

Dipekerjakan oleh badan federal, Negara bagian, dan lokal. Secara umum mereka dapat dianggap sebagai bagian dari kategori yang lebih luas dari auditor internal.

4. Auditor Forensik (*forensic auditor*)

Dipekerjakan oleh perusahaan, badan pemerintah, kantor akuntan publik, dan perusahaan jasa konsultasi dan investigasi. Mereka dilatih untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan mencegah kecurangan serta kejahatan kerah putih. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) adalah organisasi utama yang mendukung auditor forensik.

2.1.3.3 Standar Auditing

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernyataan standar teknis dalam SPAP (2011:001.7) terdiri dari:

1. Pernyataan Standar Auditing
2. Pernyataan Standar Atestasi
3. Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review
4. Pernyataan Jasa Konsultasi
5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu

SPAP meliputi standar auditing yang berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan prosedur auditing tersebut. Standar auditing yang

ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150.1) adalah sebagai berikut

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.4 Audit Investigatif

2.1.4.1 Definisi Audit Investigatif

Pengertian audit investigasi menurut Wahono (2005:6) adalah sebagai berikut:

“Merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan”.

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) secara resmi mendefinisikan “*Fraud Examination*” (2010) sebagai berikut.

“Fraud examination is methodology for resolving fraud allegations from inception to disposition. More specifically, fraud examination involves obtaining evidences and taking statements, writing reports, testifying to findings, and assisting in the detection and prevention of fraud”.

Menurut Rosjidi (2001) investigasi adalah audit dengan tujuan khusus yaitu untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (*fraud*), ketidakteraturan (*irregularities*), pengeluaran ilegal (*illegal expenditure*) atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) di bidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan atau, kolusi, nepotisme yang harus diungkapkan oleh auditor serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang seperti kejaksaan atau kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Islahuzzaman (2012:157)

Fraud Audit merupakan suatu Teknik audit yang tujuannya menemukan masalah yang berkaitan dengan penyimpangan dalam keuangan yang biasanya memerlukan suatu keputusan pengadilan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa audit investigatif adalah suatu audit yang bertujuan khusus untuk membuktikan dugaan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) dengan pendekatan serta teknik-teknik yang digunakan dalam proses penyelidikan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

2.1.4.2 Pendekatan Audit Investigatif

Pendekatan audit investigatif dapat dilakukan secara reaktif ataupun proaktif (Wahono:2011):

1. Audit Investigatif Reaktif

Audit investigatif dikatakan bersifat reaktif apabila auditor melaksanakan audit setelah menerima atau mendapatkan informasi dari pihak lain mengenai kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan. Audit investigatif yang bersifat reaktif umumnya dilaksanakan setelah auditor menerima atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi misalnya dari auditor lain yang melaksanakan audit reguler, dari pengaduan masyarakat, atau karena adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Karena sifatnya yang reaktif maka auditor tidak akan melaksanakan audit jika tidak tersedia informasi tentang adanya dugaan atau indikasi kecurangan dan kejahatan.

2. Audit Investigatif Proaktif

Audit investigatif dikatakan bersifat proaktif apabila auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum melaksanakan audit investigatif. Auditor secara aktif mencari, mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi-informasi yang diperoleh untuk menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan. Audit investigatif yang bersifat

proaktif perlu dilakukan pada area atau bidang-bidang yang memiliki potensi kecurangan atau kejahatan yang tinggi. Audit yang bersifat proaktif dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan atau kejahatan yang lebih besar. Selain itu, audit investigatif yang bersifat proaktif juga dapat menemukan kejahatan yang sedang atau masih berlangsung sehingga pengumpulan bukti untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan tersebut lebih mudah dilaksanakan.

Hasil dari suatu audit investigatif, baik yang bersifat reaktif maupun proaktif dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan kejahatan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil audit tersebut, aparat penegak hukum akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

2.1.4.3 Pembuktian Audit Investigatif

Audit investigasi dilaksanakan agar dapat membantu penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, signifikan dan kompeten. Pemeriksaan di sidang pengadilan mempunyai satu tujuan saja, yaitu mencari alat bukti yang membentuk keyakinan hakim tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Hanya alat bukti yang sah yang diperoleh di sidang pengadilan, yang dapat meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Pasal 183 KUHAP menyatakan.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan”.

Pasal 184 KUHAP menyatakan alat bukti sesuai dengan urutan kekuatan pembuktiannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang disaksikan langsung oleh saksi dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut dan tidak didasarkan dari apa yang didengarkan dari pihak lainnya.
2. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk menyatakan titik terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ini harus berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa hakim.
3. Surat dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, surat yang dikuatkan dengan sumpah meliputi berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan berlaku jika memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui dan alami secara langsung. Terdakwa dapat memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya tetapi harus disertai dengan alat bukti lain.

Dalam sidang pengadilan ahli-ahli forensik, dan dalam praktik kelompok ahli lainnya juga terdiri atas para akuntan atau pelaksana audit investigatif dapat dihadirkan untuk memberi keterangan ahli demi keadilan dan mereka dapat disebut *expert witness*. KUHAP menggunakan istilah “ahli”, meskipun dalam percakapan sehari-hari dan oleh pers digunakan istilah “saksi ahli” (Tuanakotta, 2010:7). KUHAP pasal 179 ayat (1) menyatakan: “setiap orang yang diminta

pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

2.1.4.4 Pelaporan dan Tindak Lanjut Audit Investigatif

Pelaporan dan tindak lanjut audit investigatif adalah sebagai berikut.

a. Pelaporan Hasil Audit Investigatif

Penyusunan laporan merupakan sebuah tahap akhir dalam suatu audit investigatif, laporan ini akan menyajikan temuan dan informasi penting lainnya yang dapat mengungkap dugaan *fraud* secara jelas. Kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan, akan tergantung dari materi hasil audit dan apabila ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi atau perdata.

Priantara (2013:421) menjelaskan mengenai distribusi laporan hasil audit investigatif sebagai berikut.

1. Prinsip umum adalah laporan harus disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti hasil temuan. Temuan yang terkait dengan tata kelola (*governance*), manajemen risiko *fraud* dan risiko operasional, dan pengendalian internal diserahkan kepada semua unit kerja yang memiliki kepentingan, tugas dan tanggung jawab untuk memperbaiki.
2. Temuan yang terkait dengan indikasi tindak pidana, setelah melalui proses validasi ketepatan jenis *fraud* dan kesahihan fakta adanya *fraud* yang ditunjukkan dengan bukti, resume kasus, hasil ekspose, diteruskan kepada pimpinan instansi untuk diputuskan diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Untuk perusahaan komersial, keputusan untuk menyerahkan laporan hasil audit investigasi *fraud* sebagai detik aduan kepada lembaga penegak hukum berdasarkan pertimbangan biaya, manfaat, risiko serta regulasi yang mengatur.
3. Temuan yang terkait dengan pelanggaran etika dan standar pelayanan yang menyertai *fraud* (jika ada), diteruskan kepada komite atau unit kerja yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran etika dan atau standar pelayanan.

b. Format Laporan Audit Investigatif

Organisasi pengawasan yang didalamnya memiliki satuan unit investigasi, khususnya untuk sektor pemerintahan memiliki pedoman yang baku didalam penyusunan laporan hasil audit investigatif sehingga dapat menyajikan informasi

husus secara konsisten. Format yang digunakan juga umumnya terdiri dari memorandum, dokumen-dokumen, lampiran, indeks, halaman judul dan surat pengantar. Jika dalam proses audit investigatif ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangann yang membutuhkan tindaklanjut maka laporan akan dibuat dalam bentuk bab, namun jika tidak dijumpai unsur-unsur penyimpangan maka cukup dengan menerbitkan surat yang menjelaskan tidak adanya tindak pidana pada kasus yang telah diaudit.

Berikut merupakan struktur laporan audit investigatif yang dikutip dari materi Pusdiklatwas BPKP (2008:122) :

Bab I : Simpulan dan Saran

Bab II : Umum, berisi :

1. Dasar Audit
2. Tujuan Audit
3. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit
4. Data Umum

Bab III : Uraian Hasil Audit Investigatif, yang memuat :

1. Dasar Hukum Auditee

2. Temuan Hasil Audit

2.1 Sistem Pengendalian Intern

2.2 Materi Temuan

2.2.1 Jenis Penyimpangan

2.2.2 Modus Operandi Penyimpangan

2.2.3 Dampak Penyimpangan

2.2.4 Sebab Penyimpangan

2.2.5 Unsur Kerja Sama

2.2.6 Pihak yang Diduga Terlibat

2.3 Tindak Lanjut

3. Rekomendasi

4. Lampiran

c. Penyampaian Laporan Hasil Audit Investigatif

Tahap akhir dalam proses audit investigatif yaitu penyampaian hasil audit kepada pihak atau instansi yang terkait, dimana fokus, metode serta pelaksanaan audit diarahkan agar dapat memenuhi kebutuhan para pengguna laporan. Untuk kasus yang diaudit dan kemudian ditemukan adanya penyimpangan, maka akan diteruskan dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dimana hal ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum.

d. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif

Ketika melaksanakan audit investigatif dan terdapat indikasi tindak penyimpangan, maka tim audit investigatif akan mengeksposekan (mengkomunikasikan temuan secara efektif dan efisien) materi yang tertuang dalam laporan hasil audit investigatif, ekspose dilakukan secara intern di lingkungan unit pengawasan di hadapan para pejabat yang terkait, dengan menyertakan pejabat perwakilan dari biro hukum.

Sebagai kelanjutan dari hasil pemaparan tersebut, kepala unit pengawasan akan mengadakan pemaparan dengan mengundang pihak lembaga penegak hukum lainnya, untuk memantapkan temuan auditor dan menghasilkan keputusan mengenai kepastian terjadinya tindak pidana. Instansi yang

berwenang dalam menangani kasus tindak pidana KKN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

e. Saksi atau Pemberi Keterangan Ahli

Perlu dipahami bahwa pelaksanaan audit investigatif, terutama berkaitan dengan pencarian dan pengumpulan bukti, menyatakan bahwa seorang auditor pada dasarnya memiliki keterbatasan dalam kewenangannya. Kewajiban terakhir yang dimiliki oleh seorang auditor investigatif yaitu memberikan keterangan dimuka pengadilan jika diminta oleh pihak yang berwenang, dan keterangan ini disebut keterangan ahli. Yang menjadi alat bukti yang sah didasarkan pada UU No.8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (28) *“keterangan ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan audit”*.

Syarat sahnya sebuah keterangan ahli (Pusdiklatwas BPKP, 2008:135) adalah :

- a) Diberikan oleh seorang yang ahli
- b) Ahli tersebut mempunyai keahlian yang khusus
- c) Tujuannya untuk membuat terang suatu perkara
- d) Keterangan yang diberikan menurut pengetahuannya, sesuai dengan disiplin ilmunya, yang sebaik-baiknya
- e) Dilakukan di bawah sumpah.

Ketika seorang auditor investigatif memenuhi panggilannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli, maka ia harus tetap berpegang pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, karena adanya potensi untuk dapat dikenakan sanksi atau tuntutan hukum.

1. Tuntutan Pidana, seorang auditor wajib mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai ahli untuk konsisten memberikan keterangan yang benar sesuai dengan pengetahuannya yang dimiliki, namun apabila seorang auditor memberikan keterangan yang palsu maka bisa diancam pidana berdasarkan pasal 317 KUHP.
2. Tuntutan Perdata, kemungkinan bagi seorang auditor untuk dituntut secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUHP (perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lainnya). Tuntutan secara perdata terhadap auditor dapat diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Beberapa hal yang harus diwaspadai dalam hal ini oleh seorang auditor ketika terdapat pertentangan kepentingan auditor yang mengurangi independensinya.

2.1.5 Kompetensi.

2.1.5.1 Definisi Kompetensi

Mulyadi (2002:19) mengatakan bahwa “Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.” Berdasarkan penjelasan ini, kompetensi auditor adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang cukup dan tegas dalam melakukan audit secara cermat, objektif dan seksama, sehingga audit yang dilakukan secara cermat, objektif dan seksama akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

2.1.5.2 Indikator Kompetensi

Menurut Mulyadi (2006:20) dalam Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (Prinsip Kelima: Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional) mengatakan bahwa:

“Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti diisyaratkan oleh Prinsip Etika”.

Berdasarkan uraian di atas mengenai Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (Prinsip Kelima: Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional), maka dalam penelitian ini untuk mengukur kompetensi akan menggunakan 2 indikator yaitu pendidikan dan pengalaman.

1. Pendidikan

Pendidikan adalah pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit, untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI 2001). Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan berkelanjutan.

2. Pengalaman

Pengalaman audit adalah kemampuan yang dimiliki auditor atau akuntan pemeriksa untuk belajar dari kegiatan-kegiatan masa lalu yang berkaitan dengan seluk-beluk audit atau pemeriksaan. Pengalaman audit akan meningkatkan kompetensi dalam menjalankan setiap penugasan. Audit berpengalaman mamakai analisis yang lebih teliti, terinci dan runtut dalam mendeteksi gejala kekeliruan dibandingkan dengan analisis yang tidak berpengalaman. Pencapaian kompetensi harus memperoleh pengalaman profesional dengan mendapatkan supervisi memadai dan *review* atas pekerjaan dari atasan yang lebih berpengalaman.

2.1.6 Independence Threats

2.1.6.1 Independensi

Peraturan mengenai independensi menyatakan bahwa "Seorang CPA yang berpraktik publik harus independen dalam memberikan jasa profesional sebagaimana disyaratkan oleh standar resmi yang dikeluarkan oleh Dewan." Peraturan 101 mensyaratkan independensi audit, telaah dan penugasan atestasi lainnya. Menurut Standar Auditing Seksi 220.1 SPAP (2011) menyebutkan bahwa "Auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum."

Pengertian tersebut mengartikan bahwa auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar.

Mulyadi (2002:26) menyebutkan bahwa:

"Independensi berarti suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya".

2.1.6.2 Klasifikasi Independensi

Arens et al (2012:134) mengklasifikasikan independensi dalam dua aspek, yaitu:

1. *Independence in mind* (independensi dalam fakta)

Auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi dan keterkaitan yang erat dengan objektivitas. Independensi dalam fakta akan ada apabila

kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.

2. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan)

Pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Meskipun auditor telah menjalankan auditnya dengan baik secara independen dan objektif, pendapat yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila ia tidak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan yang sangat penting bagi perkembangan profesi auditor.

2.1.6.3 *Independence Threats*

Ancaman terhadap Independensi menurut IFAC (2013) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), ancaman dalam independensi dapat berbentuk:

a. Kepentingan diri (*self-interest*)

Kepentingan diri (*self-interest*) adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik, antara lain:

- Kepentingan keuangan dalam perusahaan klien, atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien.
- Kekhawatiran berlebihan bila kehilangan suatu klien.

b. Review diri (*self-review*)

Contoh Ancaman Review Diri untuk akuntan publik antara lain:

- Temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang.
- Pelaporan operasi sistem keuangan setelah terlibat dalam perancangan dan implementasi sistem tersebut.

c. Advokasi (*advocacy*)

Ancaman Advokasi dapat timbul bila akuntan profesional mendukung suatu posisi atau pendapat sampai titik dimana objektivitas dapat dikompromikan.

Contoh langsung ancaman untuk akuntan publik antara lain:

- Mempromosikan saham perusahaan publik dari klien, dimana perusahaan tersebut merupakan klien audit.
- Bertindak sebagai pengacara (penasihat hukum) untuk klien penjaminan dalam suatu litigasi atau perkara perselisihan dengan pihak ketiga.

d. Kekerabatan (*familiarity*)

Ancaman kekerabatan (*familiarity*) timbul dari kedekatan hubungan sehingga akuntan profesional menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan akuntan tersebut. Contoh langsung ancaman kekerabatan untuk akuntan publik, antara lain:

- Anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang direktur atau pejabat perusahaan klien.
- Anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang karyawan klien yang memiliki jabatan yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pokok dari penugasan.

e. Intimidasi (*intimidation*)

Ancaman intimidasi (*intimidation threats*) dapat timbul jika akuntan profesional dihalang untuk bertindak objektif, baik secara nyata maupun dipersepsikan. Contoh ancaman intimidasi untuk Akuntan Publik, antara lain:

- Diancam dipecat atau diganti dalam hubungannya dengan penugasan klien.
- Diancam dengan tuntutan hukum.
- Ditekan secara tidak wajar untuk mengurangi ruang lingkup pekerjaan dengan maksud untuk mengurangi *fee*.

2.1.7 Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan atau suatu peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehubungan dengan bagaimana melakukan pekerjaan yang benar (Handoko, 2003:7). Martoyo (2002:4) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga demikian tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran yang dimana tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Syafi'i (2002) menjelaskan bahwa audit investigasi dilakukan atas dasar kewenangan yang ada pada lembaga audit, satuan pengawas, permintaan dari DPR, dewan komisaris atau manajer suatu perusahaan atau ketentuan lain sebagai dasar pelaksanaan. Pada umumnya laporan audit investigasi berisi: dasar audit, temuan audit, tindak lanjut dan saran. Sedangkan laporan audit yang akan diserahkan kepada kejaksaan, dalam temuan audit memuat: modus operandi, sebab terjadinya penyimpangan, bukti yang diperoleh dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan.

BPKP (2008) memaparkan sistematika standar pelaksanaan prosedur investigatif meliputi:

a. Perencanaan

Dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor harus menyusun rencana audit. Rencana audit tersebut harus dievaluasi dan bila perlu disempurnakan selama proses audit investigatif berlangsung sesuai dengan perkembangan hasil audit investigatif di lapangan. Perencanaan audit investigatif dimaksudkan untuk

memperkecil tingkat risiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif secara efisien dan efektif.

Rencana audit memuat langkah-langkah berikut:

- Menentukan sifat utama pelanggaran.
- Menentukan fokus perencanaan dan sasaran audit investigatif.
- Mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran hukum, peraturan, atau perundang undangan, dan memahami unsur-unsur yang terkait dengan pembuktian atau standar.
- Mengidentifikasi dan menentukan prioritas tahapan audit investigatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran audit investigatif.
- Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan audit investigatif.
- Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, termasuk instansi penyidik jika diperlukan.

b. Supervisi

Pada setiap tahap audit investigatif, pekerjaan auditor harus disupervisi atau diawasi secara seksama dan memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor.

c. Pengumpulan dan Pengujian Bukti

Auditor investigatif harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif.

- Pengumpulan bukti

Auditor investigatif harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan. Pengumpulan bukti bertujuan untuk menentukan apakah informasi awal yang diterima dapat diandalkan karena akan digunakan auditor untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit.

- Pengujian bukti

Auditor investigatif harus menguji bukti audit yang dikumpulkan, dimaksudkan untuk menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan dan kesesuaian bukti dengan hipotesis.

d. Dokumentasi

Auditor harus menyiapkan dan menatausahakan dokumen audit investigatif dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit investigatif harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis. Kemungkinan bagi seorang auditor untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi tergantung pada efektivitas pelaksanaan prosedur auditnya, dimana tercapainya tujuan audit investigasi yang dilakukan dengan menerapkan prosedur dan teknik-teknik audit didukung kompetensi yang cukup memadai dan independensi yang baik untuk menjadi seorang auditor investigatif.

Efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi ini dapat tercapai apabila auditor memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat memenuhi standar-standar pelaksanaannya dan menjaga independensi sebagai etika dalam melakukan audit. Wahono (2011:1) menyimpulkan prosedur audit dimulai dengan tahap penelaahan informasi awal, perencanaan pemeriksaan investigatif, pelaksanaan pemeriksaan investigatif, pelaporan dan tindak lanjut. Bila tidak memiliki kompetensi yang cukup dan tidak bisa menjaga independensinya, auditor lebih baik mundur dalam menerima tugas karena terdapat kemungkinan hasil investigasi tidak akan maksimal. Dengan standar yang telah dikemukakan, maka pihak yang diaudit (*auditee*), pihak yang memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain dapat mengukur efektivitas dari pelaksanaan prosedur audit investigasi sehingga hasilnya dapat meminimalisasi kerugian keuangan atau kekayaan negara.

2.1.8 Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) perlu dibedakan dengan kekeliruan (*error*). Kekeliruan dapat dideskripsikan sebagai "unintentional mistakes" (kesalahan yang tidak disengaja). Kekeliruan dapat terjadi pada setiap tahap dalam pengelolaan transaksi, dari terjadinya transaksi, pendokumentasian, pencatatan, pengikhtisaran hingga proses menghasilkan laporan keuangan (Herman, 2009:26).

Secara umum definisi *fraud* yang dikemukakan oleh Zimbelman *et.al* (2012:7), menjelaskan.

"Kecurangan merupakan suatu istilah yang umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan kecurangan, termasuk kejut, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya dalam mendefinisikan kecurangan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia".

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* menyatakan "*fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another*". Berdasarkan berbagai macam definisi tersebut, *fraud* dapat juga diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. (Karyono, 2013:5)

Dalam Standar Auditing (SA) seksi 316 – Pertimbangan atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan – (PSA No. 70) menyebutkan ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit atas Laporan Keuangan:

- a. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti: (a) manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan (b) representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan (c) salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.
- b. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu diantara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Deteksi kecurangan mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan (fraud indicators) yang memerlukan tindak lanjut auditor untuk melakukan investigasi. Ramaraya (2008:4) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. Atas literatur

yang tersedia, dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang menjadikan pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan sehingga auditor gagal dalam usaha mendeteksi. Faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

1. Karakteristik terjadinya kecurangan
2. Memahami Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan
3. Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit
4. Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan.

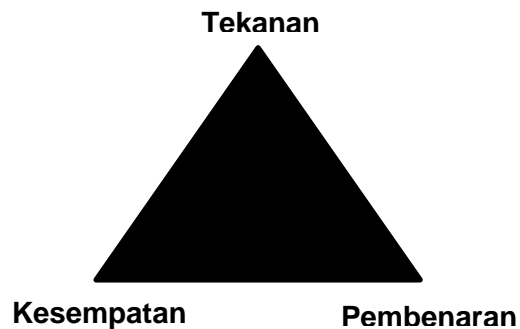
Auditor terutama tertarik pada pencegahan, deteksi, dan pengungkapan kesalahan-kesalahan karena alasan-lasan berikut:

1. Eksistensi kesalahan dapat menunjukan pada auditor bahwa catatan akuntansi kliennya tidak dipercaya dan dengan demikian tidak memadai sebagai suatu dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Adanya sejumlah besar kesalahan mengakibatkan auditor dapat menyimpulkan bahwa telah dilakukan pencatatan akuntansi yang tidak benar.
2. Apabila auditor ingin mempercayai pengendalian interen, auditor harus memastikan dan menilai pengendalian tersebut dan melakukan pengujian ketaatan (*compliance test*) atas operasi. Apabila pengujian ketaatan menunjukkan sejumlah besar kesalahan, maka auditor tidak dapat mempercayai pengendalian interen kliennya.
3. Apabila kesalahan cukup material, kesalahan tersebut dapat mempengaruhi kebenaran (*truth*) dan kewajaran (*fairness*) laporan keuangan.

Banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu kecurangan, baik itu karena pengaruh orang lain ataupun atas kemauan diri sendiri. Menurut karyono (2013:8) dalam teori segitiga kecurangan, perilaku

fraud didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga unsur tersebut dapat digambarkan 2.1 dalam segitiga sama sisi karena bobot/derajat ketiga unsur tersebut itu sama.

Gambar 2.1 Segitiga *Fraud*



1. Tekanan

Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena:

- a. Tekanan keuangan; antara lain berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan, keserakahan, dan kebutuhan yang tidak terduga.
- b. Kebiasaan buruk; antara lain kecanduan narkoba, judi, dan peminum minuman keras
- c. Tekanan lingkungan kerja; seperti kurang dihargainya prestasi/kinerja, gaji rendah dan tidak puas dengan pekerjaan

2. Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kerja. Disamping itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindak kriminal.

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan *fraud* yaitu:

- a. Kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan
- b. Terbatasnya akses terhadap informasi
- c. Ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan pegawai
- d. Kurangnya jejak audit.

3. Pembenaran (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembenaran antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

Secara umum penyebab terjadinya kecurangan diakibatkan oleh faktor utama (faktor internal atau dari diri orang yang bersangkutan) dan faktor sekunder atau faktor eksternal. Penyebab utama (internal) terjadinya kecurangan, antara lain adalah:

- 1. Penyembunyian (*concealment*). Kesempatan yang ada tidak terdeteksi oleh pengendalian internal perusahaan, sehingga kesempatan tersembunyi ini diketahui oleh seorang yang kemudian melakukan kecurangan.
- 2. Kesempatan (*opportunity*). Pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat agar dapat mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga menghindari deteksi dini.

3. Motivasi (*motivation*). Pelaku membutuhkan motivasi untuk melakukan aktivitas demikian, suatu kebutuhan pribadi seperti ketamakan/kerakusan dan motivasi lain.
4. Daya tarik (*attraction*). Sasaran kecurangan akan direncanakan biasanya jika merupakan sesuatu yang menarik atau menguntungkan pelaku.
5. Keberhasilan (*success*). Pelaku perlu menilai peluang berhasil tidaknya suatu tindak kecurangan, yang dapat menghindari penuntutan atau deteksi.

Adapun penyebab sekunder terjadinya kecurangan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengendalian internal perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas perusahaan yang dianggap sebagai suatu tunjangan karyawan.
2. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja yang jelek, yaitu kurang adanya saling percaya dan penghargaan yang tidak semestinya. Pelaku dapat menemukan alasan bahwa kecurangan hanya merupakan kewajibannya.
3. Balas dendam (*revenge*), yaitu ketidaksukaan yang berlebihan terhadap organisasi dapat mengakibatkan pelaku berusaha merugikan organisasi tersebut.
4. Tantangan (*challenge*), yaitu karyawan yang bosan dengan lingkungan kerja mereka dapat mencari stimulasi dengan berusaha untuk “merusak sistem”, sehingga mendapatkan kepuasan sesaat atau pembebasan frustrasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Prosedur audit adalah suatu tahapan yang digunakan auditor dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi dan independensi sangat menentukan prosedur audit bisa dijalankan dengan baik atau tidak dan menentukan kualitas

audit yang dihasilkan seperti yang dikemukakan oleh AAA *Financial Accounting Standard Committee* (2000), yaitu:

“Good quality audits require both competence (expertise) and independence. These qualities have direct effects on actual audit quality, as well as potential interactive effects. In addition, financial statement users perception of audit quality are a function of their perceptions of both auditor independence and expertise.”

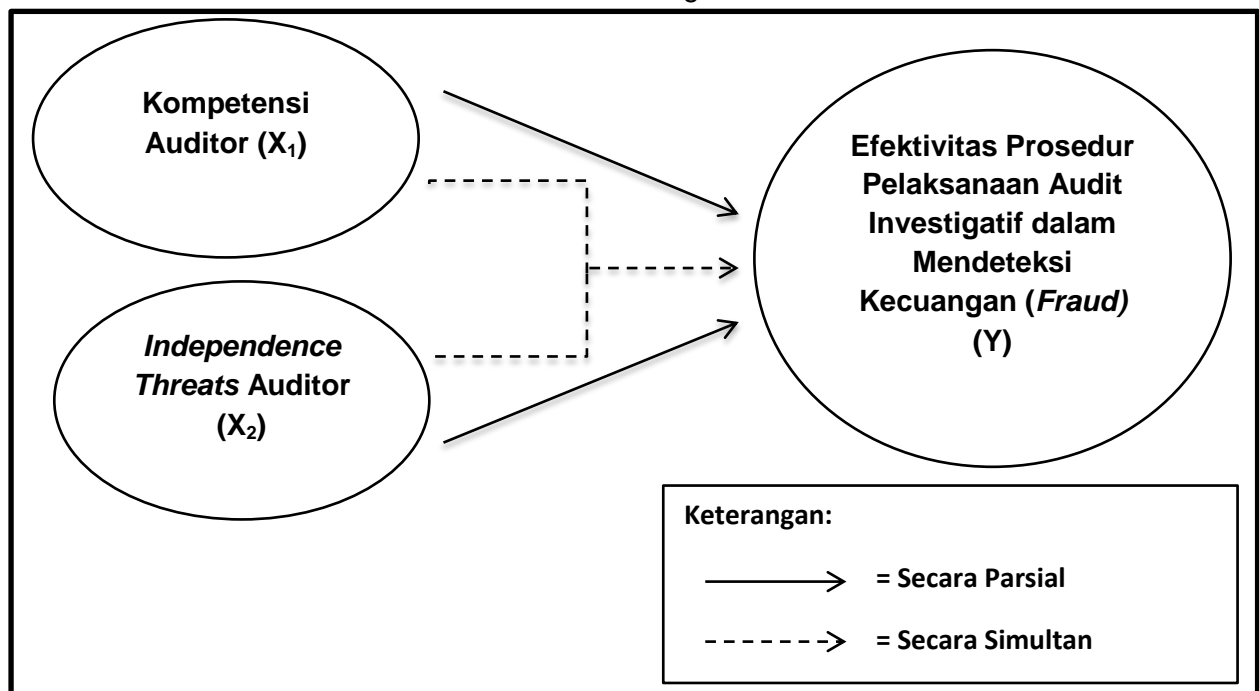
Kompetensi adalah suatu keahlian profesional yang dimiliki oleh seorang auditor atas dasar pengetahuan dari pendidikan formal, pelatihan, simposium dan lain-lain. Selain itu, pengalaman merupakan hal yang menunjang auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang baik.

Auditor dalam melaksanakan proses audit harus bersikap independen dan tidak memihak, baik dalam fakta maupun dalam penampilan. Independensi seorang auditor tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan personal auditor sendiri maupun kepentingan eksternal, yaitu dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan audit yang dihasilkan. Auditor perlu menjaga independensinya terhadap ancaman-ancaman yang mungkin dapat mempengaruhi independensi dan integritasnya.

Efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dapat tercapai apabila auditor memiliki kompetensi yang cukup untuk memenuhi standar-standar pelaksanaan dan dapat menjaga independensinya dari berbagai ancaman baik dalam internal diri auditor maupun pihak-pihak eksternal.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini di gambarkan dalam gambar 2.2

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Penulis, 2016

2.3 Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Auliah (2013)	Pengaruh pengalaman, independensi dan skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan	1. Pengalamam 2. Independensi 3. Skeptisme Profesional 4. Pendeteksian Kecurangan	Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.
Inge (2015)	Pengaruh Independensi dan Skeptisme Profesional auditor Terhadap pendeteksian kecurangan (<i>Fraud</i>) (Studi Pada	1. Independensi 2. Skeptisme Profesional 3. Pendeteksian Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa independensi auditor sangat berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (<i>fraud</i>). Semakin tinggi tingkat

	Auditor Pemerintah di Perwakilan BPKP Provinsi Sul-Sel)		independensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (<i>fraud</i>).
Masrizal (2010)	Pengaruh Pengalaman dan Pengetahuan Audit Terhadap Pendeteksian Temuan Kerugian Daerah (Studi Pada Auditor Inspektorat Aceh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman audit 2. Pengetahuan audit 3. Pendeteksian temuan kerugian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan dan secara parsial Pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah 2. Secara simultan dan secara parsial keterampilan/ pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah 3. Secara simultan dan parsial pengalaman dan keterampilan/ pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah.
Novianti (2015)	Pengaruh kompetensi dan <i>independence threats</i> terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan (<i>fraud</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. <i>Independence threats</i> 3. Efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan (<i>fraud</i>) 	Secara simultan kompetensi dan <i>independence threats</i> berpengaruh signifikan terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan (<i>fraud</i>)
Zulaiha (2008)	Pengaruh kemampuan auditor investigatif terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Auditor 2. Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam 	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Badan

	efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan	Pembuktian Kecurangan	Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kemampuan auditor investigatif bermanfaat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan karena auditor investigatif telah melaksanakan prosedur audit yang efektif.
--	--	-----------------------	---

Sumber: Olahan penulis (2016)

2.3.2 Hipotesis Penelitian

2.3.2.1 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

H_1 : Kompetensi auditor berpengaruh terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan. Semakin meningkat kompetensi seorang auditor maka akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Seorang auditor yang melaksanakan audit investigasi atau yang disebut auditor investigatif harus memiliki kualitas, keterampilan dan keahlian khusus serta kualitas mental dan fisik yang baik untuk dapat menunjang efektivitas pelaksanaan prosedur audit, pendapat ini didukung oleh Tuanakotta (2010:349) yang mengemukakan bahwa seorang auditor yang melaksanakan audit investigatif harus memiliki pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Teori kognitif memandang belajar sebagai proses yang

memberi fungsi unsur-unsur kognisi terutama pikiran untuk mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Teori ini lebih menekankan bagaimana proses atau upaya mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan teori atribusi yang mengatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut telah berperilaku demikian yang disebabkan oleh situasi tertentu.

Penelitian ini menggunakan teori kognitif dan atribusi sebagai dasar teori penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam mencapai efektivitas pelaksanaan prosedur audit. kompetensi seorang auditor dapat terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan. Setiap auditor melakukan audit maka auditor akan belajar dari pengalaman auditnya sebagai akibat dari pengaruh internal dan eksternal auditor untuk memahami serta meningkatkan kecermatan dalam pelaksanaan audit. Selanjutnya, auditor akan mengintegrasikan pengalaman auditnya dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Proses memahami dan belajar inilah yang menjadi proses peningkatan keahlian auditor seperti bertambahnya pengalaman dan meningkatnya pengetahuan auditor dalam melakukan audit untuk mencapai efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*.

Hasil penelitian Aulia (2013) ditemukan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Selanjutnya, Zulaiha (2008) menyimpulkan bahwa kemampuan auditor investigatif bermanfaat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan karena auditor investigatif telah melaksanakan prosedur

audit yang efektif. Selain itu, penelitian Masrizal (2010) menyimpulkan bahwa secara simultan dan secara parsial keterampilan/pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah, dimana keterampilan dan pengetahuan merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh auditor untuk menunjang kompetensi sesuai dengan PSA N0 4 (SA Seksi 210.0) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, serta auditor harus secara khusus menaksir risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan dan harus mempertimbangkan taksiran risiko ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan (SPAP:SA seksi 316.4).

2.3.2.2 Pengaruh *Independence Threats* Auditor Terhadap Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

H₂ : *Independence threats* Auditor berpengaruh terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)

Hipotesis kedua (H₂) menyatakan bahwa *independence threats* berpengaruh terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan. Standar umum kedua mensyaratkan auditor untuk independen dari klien dalam rangka menerbitkan suatu pendapat. Hal ini berarti bahwa seorang auditor dalam melakukan audit harus menjaga independensi dari ancaman internal dalam dirinya maupun eksternal untuk menghasilkan kualitas audit yang baik.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku

yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa dengan hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai dasar penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku seorang auditor dalam melakukan audit. seperti dijelaskan sebelumnya bahwa perilaku seseorang dapat disebabkan dari internal dirinya sendiri misalnya sifat, karakter, sikap, dll. ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Seorang auditor dalam melakukan audit laporan keuangan harus menjunjung tinggi independensi. independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Setiap kali auditor melakukan audit maka seorang auditor harus independen dan tidak boleh terpengaruh baik dari pihak internal maupun eksternal untuk mencapai efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*.

Hasil penelitian Inge (2015) menyimpulkan bahwa menunjukkan bahwa independensi auditor sangat berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*). Semakin tinggi tingkat independensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Hal ini senada dengan hasil penelitian Novianti (2015) menyatakan bahwa secara parsial *independence threats* yang diteliti berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Semakin tinggi adanya

independence threats maka semakin efektif prosedur pelaksanaan audit investigatif yang dijalankan. Sesuai dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan di dalam SPKN paragraf 14, yaitu dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan atau menjalankan prosedur, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari segala gangguan independensi yaitu gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi. Dengan demikian organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak siapapun.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian Kausalitas, yaitu menganalisis hubungan kausalitas antara variabel penelitian sesuai dengan hipotesis yang disusun. Menurut Sugiyono (2010:56) metode kausal adalah “hubungan yang bersifat sebab akibat, jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi)”. Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan dari peneliti adalah untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh yang terjadi antar variabel. sebagai alat pengumpul data primer.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Gedung kantor BPKP ini terletak di Jalan Tamalanrea Raya No.3 Bumi Tamalarea Permai (BTP) Makassar dan penelitian dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:61) populasi adalah “Wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun populasi dalam penelitian ini auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 115 orang auditor.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono (2013:62) adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Sampel pada penelitian ini adalah auditor internal pemerintah

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling* yaitu metode pengambilan sampel dari semua populasi dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Sampelnya merupakan auditor BPKP yang ditemui oleh peneliti secara acak di lokasi penelitian.

Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{N(e^2) + 1}$$

$$n = \frac{115}{115(10\%)^2 + 1}$$

$$n = 53,48$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka populasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 55 (pembulatan dari 53,48)

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Tingkat kesalahan, dalam hal ini peneliti menggunakan 10%

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat di mana penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden.
2. Data Sekunder, yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur, buku, jurnal, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis kepada responden yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian dan tiap jawaban diberikan nilai (*score*). Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan literatur tentang *auditing* yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3. Mengakses situs-situs dan *website*, metode ini digunakan untuk mencari referensi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi dan *independence threats* auditor. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi, akibat dari adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.6.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional Variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Definisi operasional dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

1. Kompetensi

Mulyadi (2002:19) mengatakan bahwa “Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.” Berdasarkan pernyataan ini, kompetensi auditor adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang cukup dan tegas dalam melakukan audit secara cermat, objektif dan seksama, sehingga audit yang dilakukan secara cermat, objektif dan seksama akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi dalam penelitian ini adalah pendidikan dan pengalaman.

a.. Pendidikan

Pendidikan adalah pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit, untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI 2001). Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan berkelanjutan.

b. Pengalaman

Pengalaman audit adalah kemampuan yang dimiliki auditor atau akuntan pemeriksa untuk belajar dari kegiatan-kegiatan masa lalu yang berkaitan dengan seluk-beluk audit atau pemeriksaan. Pengalaman audit akan meningkatkan kompetensi dalam menjalankan setiap penugasan. Audit berpengalaman mamakai analisis yang lebih teliti, terinci dan runtut dalam mendeteksi gejala kekeliruan dibandingkan dengan analisis yang tidak berpengalaman. Pencapaian kompetensi harus memperoleh pengalaman profesional dengan mendapatkan supervisi memadai dan *review* atas pekerjaan dari atasan yang lebih berpengalaman.

2. Independence Threats

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar. Ancaman terhadap Independensi menurut IFAC (2013), ancaman dalam independensi dapat berbentuk:

a. Kepentingan diri (*self-interest*)

- b. Review diri (*self-review*).
- c. Advokasi (*advocacy*)
- d. Kekerabatan (*familiarity*)
- e. Intimidasi (*intimidation*)

3. Efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan atau suatu peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehubungan dengan bagaimana melakukan pekerjaan yang benar (Handoko, 2003:7). Efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi ini dapat tercapai apabila auditor memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat memenuhi standar-standar pelaksanaannya dan menjaga independensi sebagai etika dalam melakukan audit.

3.7 Instrumen Penelitian dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bagian. Masing-masing bagian tersebut berhubungan dengan kompetensi yang diadopsi dari penelitian Novianti (2014), *independence threats* yang diadopsi dari penelitian Novianti (2014) dan efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) yang diadopsi dari penelitian Feby (2015) yang akan diisi oleh responden.

Pengukuran jawaban responden melalui pemberian skor yang telah ditentukan dalam bentuk skala linkert 1 sampai 5 untuk variabel kompetensi, *independence threats*, dan efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Caranya adalah memberikan skor pada pilihan yang tersedia, yaitu:

Sangat Tidak Setuju (STS)	= 1
Tidak Setuju (TS)	= 2
Ragu-Ragu (RR)	= 3
Setuju (S)	= 4
Sangat Setuju (SS)	= 5

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS 23.0. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis). Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat.

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2010:21).

3.8.2 Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (*Reliability*) dan tingkat keabsahan (*Validity*) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

3.8.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 2011:72). Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *product moment pearson* yang kemudian dibandingkan dengan r tabel. Nilai r tabel diperoleh dari *degree of freedom* = $n-k$, di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Apabila nilai korelasinya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid. Jika nilai korelasinya lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan dianggap tidak valid dan harus dikeluarkan dari pengujian.

3.8.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel yang diteliti (Sunyoto, 2011:67). Pertanyaan dalam kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Uji reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *cronbach's alpha* dengan bantuan software SPSS 20.0. Koefisien *cronbach's alpha* yang lebih dari nilai r table disebut reliabel. Ada juga yang berpendapat reliabel jika *cronbach alpha* $>0,60$ (Sunyoto, 2011:68). Nilai *cronbach's alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2011:84). Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi. Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan uji *one-sample Kolmogorov-smirnov*. Pengambilan keputusan dengan analisis grafik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normal *probability plot*. Uji normal *probability plot* dikatakan berdistribusi normal jika garis data rill mengikuti garis diagonal dan cara ini dianggap lebih handal daripada grafik histogram karena cara ini membandingkan data rill dengan data distribusi normal (Sunyoto, 2011:89). Sementara untuk uji *Kolmogorov-Smirnov* dikatakan berdistribusi normal jika *asymptotic significan* data lebih besar daripada 0.05 ($p > 0.05$) (Sufren, 2013:68).

3.8.3.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mencari tahu apakah kesalahan (*errors*) suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya (Sufren, 2013:108). Model regresi yang baik adalah tidak mengalami autokorelasi. Cara untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengalami autokorelasi atau tidak dengan mengecek nilai Durbin-Watson (DW). Syarat untuk tidak terjadi autokorelasi adalah $1 < DW < 3$ (Sufren, 2013:109).

3.8.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang terdiri dari minimal dua variabel bebas, di mana akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan atau pengaruh antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dalam menentukan terjadinya multikolinieritas dapat digunakan cara sebagai berikut.

- a. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0.6.
- b. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik.
- c. Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Salah satu cara untuk menguji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai tolerance harus di antara 0,0 – 1 atau tidak kurang dari 0,1, sementara untuk VIF nilainya harus lebih rendah dari angka 10 (Sufren, 2013:110). Semakin tinggi nilai VIF maka semakin rendah *tolerance*.

3.8.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama terjadi heteroskedastisitas. Hasil yang diharapkan terjadi adalah homoskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang- gelombang. Sementara homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.

3.8.4 Uji Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proporsi atau tanggapan yang sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas persoalan. Sebelum diuji, maka suatu data terlebih dahulu harus dikuantitatifkan. Pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis dari data yang sedang diuji (Sunyoto, 2011:93). Dalam penelitian analisis yang akan

digunakan yaitu analisis dengan regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur hubungan atau tingkat asosiasi antara variabelvariabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan, persamaannya sebagai berikut (Manurung dkk, 2005:104).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

α = konstanta

X₁ = Kompetensi Auditor

X₂ = *Independence threats*

$\beta_1 \dots \beta_3$ = koefisien regresi yang akan dihitung

ε = faktor pengganggu atau *error term*

Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik dan uji Koefisien Determinasi (R²). Untuk menguji hipotesis dengan uji statistik mengenai pengaruh kompetensi dan *independence threats* terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan digunakan dua bentuk pengujian hipotesis yakni secara simultan dengan uji *F* (untuk melihat kompetensi dan *Independence threats* auditor terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan) dan secara parsial dengan uji *t* (untuk melihat pengaruh masing masing variabel terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan).

3.8.4.1 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat dari seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependen.

3.8.4.2 Pengujian Parsial (uji t)

Statistik uji t digunakan untuk menguji secara sendiri-sendiri hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) (Sugiyono, 2013:235). Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut.

- a. $H_0 : \beta = 0$, kompetensi dan *independence threats* auditor tidak berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan.
- b. $H_a : \beta \neq 0$, kompetensi dan *independence threats* auditor berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan.

Untuk mencari t tabel dihitung dengan $df = n-k-1$, di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Taraf nyata 5 % dapat dilihat dengan menggunakan tabel statistik. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel t . Dasar pengambilan keputusan adalah.

- a. Jika t hitung $> t$ tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak
- b. Jika t hitung $< t$ tabel, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan berdasarkan probabilitas.

- a. Jika probabilitas $>$ tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

b. Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_o diterima

3.8.4.3 Uji Simultan (uji f)

Pengujian ini melibatkan kedua variabel bebas (kompetensi dan *independence threats auditor*) terhadap variabel terikat (efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)) dalam menguji ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi F, yaitu membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Nilai F tabel diperoleh dengan perhitungan *degree of freedom* = $n-k-1$, di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel Langkah pengujian secara simultan adalah sebagai berikut.

a. Menentukan H_o dan H_a .

$H_o: \beta_1\beta_2\beta_3 = 0$ kompetensi dan *independence threats auditor* tidak signifikan atau tidak berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan.

$H_a: \beta_1\beta_2\beta_3 \neq 0$ kompetensi dan *independence threats auditor* berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan.

b. Menentukan *level of significance* (α).

Pada tabel ANOVA didapat uji F yang menguji semua sub variabel bebas yang akan memengaruhi persamaan regresi. Dengan *level of significance* = 5 %.

c. Kriteria pengujian

Nilai F tabel dapat dilihat dengan menggunakan F tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah.

a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak.

b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan.

a. Jika probabilitas $>$ tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_o ditolak.

b. Jika probabilitas $<$ tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel kompetensi (X_1) sebesar 2.030 yang lebih besar dari t tabel yakni sebesar 1.674 atau t hitung $2.030 > 1.678$ t tabel. Sementara untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikansinya sebesar 0,048 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dimana 0,05 merupakan tingkat signifikan maksimal sehingga hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Pengaruh positif dan signifikan tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi auditor sangat dibutuhkan dalam menjalankan efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) dimana kompetensi auditor dapat diperoleh dari unsur kognitif auditor sebagai proses aktivitas belajar yang ada pada proses internal berpikir auditor. Selain itu, kompetensi auditor dapat dipengaruhi karena faktor eksternal yang berasal dari pengalaman auditor dalam melakukan audit.
2. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel *independence threats* (X_2) sebesar 2.484 yang lebih besar dari t tabel yakni sebesar 1.674 atau t hitung $2.484 > 1.678$ t tabel. Sementara untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikansinya sebesar 0,016 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dimana 0,05 merupakan tingkat signifikan maksimal sehingga

hasil ini menyatakan bahwa *Independence threats* auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Pengaruh positif dan signifikan ini mengindikasikan bahwa *independence threats* dari seorang auditor dibutuhkan dalam menjalankan efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan dimana *independence threats* auditor dapat berasal dari pengaruh internal diri auditor maupun eksternal auditor sehingga semakin tinggi adanya *independence threats* maka semakin efektif prosedur pelaksanaan audit investigatif yang dijalankan.

3. Berdasarkan pengujian secara simultan (uji f) menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 4.769 dengan signifikansi sebesar 0,013. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sehingga secara simultan kompetensi dan *independence threats* auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa kompetensi dan *independence threats* auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

5.2 Saran

Penelitian ini masih membutuhkan beberapa item perbaikan untuk dilakukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sejenis sehingga dapat menjadikan penelitian ini lebih baik. Adapun beberapa saran perbaikan yaitu sebagai berikut.

1. Nilai dari hasil uji koefisien determinasi (uji R) adalah 0.155 yang menunjukkan bahwa 15,5% variasi efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada auditor di BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu kompetensi (X_1) dan *independence threats* (X_2) sedangkan sisanya 85,5% dijelaskan oleh faktor lain sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain yang dapat digunakan dalam mengukur faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) seperti dengan menambahkan variabelskeptisme profesional untuk melihat apakah sikap (*attitude*) auditor dalam melakukan penugasan audit investigatif dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang dapat meningkatkan efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
2. Memperluas sampel penelitian agar dapat mendapatkan keterwakilan yang lebih besar atas populasi penelitian.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan baik itu dari individu peneliti maupun dari faktor lain yang memungkinkan memberikan efek terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan yang diperoleh, misalnya jawaban yang tidak cermat, responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur serta pernyataan yang kurang dipahami oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- AAA Financial Accounting Standard Committee. 2000. *"Commentary: SEC Auditor Independence Requirements"*. *Accounting Horizons* Vol. 15 No. 4
- ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), *Fraud Examiners Manual*, 2010 Ed., Austin, Texas.
- Arens, A. A., R. J. Elder, dan M. S. Beasley. 2006. *Auditing and Assurance Service ; an Integrated Approach*, Fourteenth Edition. Prentice Hall. New Jersey.
- Aulia, M.Y. 2013. *Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendekteksian Kecurangan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2008. *Kode Etik dan Standar Audit*. Diklat Pembentukan Auditor Ahli Kode MA : 2.210. Edisi Kelima, PPPP-BPKP. Bogor.
- Baso, Alimuddin. 2012. *Mereduksi Fenomena Fraud Dengan Audit Forensik: Audit forensik*. Buletin Pengawasan, Volume 9 No.3 September, hlm VIII-XI.
- Boynton, W.G. Kell and R.N. Johnson. 2001. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh Jilid I. Terjemahan oleh Paul A. Rajoe, Gina Gania, dan Ichsan Setiyo Budi. 2002. Erlangga. Jakarta.
- Colquitt, Jason A., Jeffery A. LePine., Michael J. Wesson. 2011. *Organizational Behaviour*. McGraw Hill International Companies. New York.
- Feby, Pratiwi. Intan. 2015. *Pengaruh Kemampuan dan Pengalaman Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Fraud*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ghozali, Imam. 2009. *Multivarite dengan Program SPSS*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gondodiyoto, Sanyoto. 2007. *Audit Sistem Informasi*. Edisi Revisi. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Cetakan Kedelapanbelas. BPFE, Yogyakarta.
- Hanjani, Andreani. 2014. *Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Fee Audit, dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Herman, Edy. 2009 "Pengaruh Pengalaman dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. PT Salemba Empat. Jakarta.
- International Federation of Accountants (IFAC). 1998. *Independence*, (online), (www.ifac.org.) diakses 24 Agustus 2016 (22.30).
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Islahuzzaman. 2012. *Istilah-istilah Akuntansi & Auditing*. Edisi Kesatu. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jamilah, S., Fanani, Z., & Grahita, C. 2007. *Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment*. Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Andi. Yogyakarta
- Masrizal. 2010. Pengaruh Pengalaman dan Pengetahuan Audit Terhadap Pendeteksian Temuan Kerugian Daerah (Studi Pada Auditor Inspektorat Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol 3 No 2: 173-194.
- Messier, Jr., W. F. Glover, S. M. Prawitt, Douglas F. 2006. *Jasa Audit & Assurance: Pendekatan Sistematis*. Terjemahan Nuri Hinduan, S.E, Ak. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi Keenam. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyadi. 2006. *Auditing*. Edisi Keenam. Salemba Empat. Jakarta.
- Novianti, Astria. 2014. Pengaruh Kompetensi dan *Independence Threats* Terhadap Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) (Studi Survey pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Jakarta. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Januari 2007. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Pradana, S.Y. 2013. *Detection of Fraudlence in Public Sector Organization: Case in Indonesia. The 5th Internasional Conference on Financial Criminology (ICFC)*.
- Ramaraya, Tri. "Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 10 No 1 (Hal 23-33). Mei 2008.
- Raya, C. Inge. 2016. Pengaruh Independensi Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) (Studi Pada Auditor

- Pemerintah Di Perwakilan Bpkp Provinsi Sul-Sel). Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Robbins, Stephen. Dan Judge, Timothy. 2008. *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)*. Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta.
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah, Kerangka, Standar dan Metode*. Aksara Satu. Surabaya.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2013. *Research Method for Business*(6th Ed.). John Wiley and Sons Ltd. United Kingdom.
- Sinollah. 2012. *Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel*, (online), (<http://sinollahblog.files.wordpress.com/2012/12/7-populasi-dan-teknikpengambilan-sampel.pdf>, diakses 30 Agustus 2016).
- Statement on Auditing Standards. 1972. *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit SAS No 82 section 110 paragraph 02*.
- Subini, Nini, dkk. 2012. *Psikologi Pembelajaran*. Mentari Pustaka. Yogyakarta.
- Sufren dan Yonathan. N. 2013. *Mahir Menggunakan SPSS secara Otodidak*. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2009,2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- Sugiyono, 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistyowati. 2003. Peran Auditor dalam Mendeteksi Fraud untuk Mewujudkan Good Governance dan Good Corporate Governance di Indoensia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 4: 13-24
- Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. CAPS. Jakarta.
- Syafi'i, Imam. 2002. *Memahami perbedaan Dasar Hukum Audit Investigasi dan Audit Forensik*, Pemeriksa no 84.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Dosen FEB UH), edisi 1. 2012. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Tirta, R. dan M, Sholihin. 2004. The Effects Of Experience and Task –Specific Knowledge On Auditors Performance In Asessing A Fraud Case. *Journal Acoounting and Auditing International* Vol. 8 No. 1: 1410-2420.
- Transparansi Internasional*. 2015. *Corruption Perception Index*, (www.ti.or.id/index.php, (diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 21.00).
- Tuanakotta, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia. Jakarta.

Wahono, Sugeng. 2011. (Artikel Audit Investigasi).

www.regional.kompas.com, (diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 20.00)

www.tempo.co.id, (diakses pada tanggal 15 agustus 2016 pukul 20.00)

Zimbelman, M.F., Albrecht, C.C., Albrecht, W.S., dan Albrecht., C.O. 2014. *Forensic Accounting*. Terjemahan oleh Novita Puspasari, Suhernita, Ratna Saraswati, *4th Edition*. Salemba Empat. Jakarta.

Zulaiha, Siti. 2008. *Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan*. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.

LAMPIRAN

Lampiran 1**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Amiruddin
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Samatellu, 11 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Batu Raja 2
No. Telepon : 082271184939
E-mail : amir.smanet@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 18 Pulau Samatellu (Tahun 2000-2006)
 - b. SMP Negeri 3 Palopo (Tahun 2006-2009)
 - c. SMA Negeri 3 Palopo (Tahun 2009-2012)
 - d. S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar (Tahun 2012-2017)
2. Pendidikan Nonformal
 - a. Pelatihan *Basic Character Study Skill* Universitas Hasanuddin (2012)
 - b. Latihan Kepemimpinan Tingkat Pertama (LK1) IMA FEB-UH (2012)
 - c. Diklat Ekonomi Islam (DEI) FOSEI FEB-UH

Riwayat Organisasi

1. Anggota Departemen Keilmuan Ikatan Mahasiswa Akuntansi Periode 2014/2015
2. *Organizing Commite 12th Indonesian Regional Science Association Internasional Conference* (2014).
3. Presidium Ikatan Mahasiswa Akuntansi Peridode 2015-2016
4. *Organizing Commite 8th Hasanuddin Accounting Days IMA FEB UH* (2015)
5. *Stering Commite 9th Hasanuddin Accounting Days IMA FEB UH* (2016)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar,

2017

Amiruddin

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH KOMPETENSI DAN *INDEPENDENCE THREATS* AUDITOR
TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF
DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*)
DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Perihal : Permohonan Menjadi Responden

Lampiran : 6 Lembar

Kepada

Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden

Responden yang terhormat,

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera teriring doa dan puji kepada Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat-Nya pada segenap aktivitas keseharian kita. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, salah satu persyaratan yang harus ditempuh adalah penelitian. Oleh karena itu, saya bermaksud melakukan penelitian pada instansi tempat Bapak/Ibu/Saudara(i) bekerja. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa angket/kuesioner (terlampir).

Saya memohon kesedian Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara(i) menjawab dengan leluasa dan sesuai dengan apa yang dipersepsikan.

Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya. Semoga penelitian ini dapat berkontribusi positif bagi kita semua, khususnya bagi lembaga BPKP RI.

Akhir kata saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan bantuannya. Wassalam.

Makassar, 2016

Peneliti

Amiruddin

A31112025

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : L / P *)

Usia :

Pendidikan Terakhir : S1 / S2 / S3 *)

Lama Bekerja (dalam Tahun) : 0-5 / 5-10 / >10 *)

Jumlah penugasan audit yang pernah ditangani sampai dengan sekarang:
..... penugasan

*) **Coret yang tidak perlu**

B. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

1. Mohon terlebih dahulu Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk membaca pernyataan pernyataan dengan cermat, sebelum mengisinya.
2. Berikan **tanda silang (X)** yang menjadi jawaban pilihan Bapak/Ibu/Saudara(i) pada salah satu keterangan yang ada:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

RR : Ragu-Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

A. KOMPETNSI AUDITOR (X₁)

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
1.	Teori yang sudah didapatkan pada pendidikan formal sangat menunjang karier saya dalam melakukan audit yang baik					
2.	Saya akan lebih terampil apabila telah mengikuti jenjang pendidikan auditor yang lebih tinggi					
3.	Saya memahami dan mampu melakukan audit sesuai standar akuntansi dan auditing yang berlaku					
4.	Saya membutuhkan pengetahuan tambahan dari seminar/ lokakarya/ studi banding tentang investigative					
5.	Banyaknya penugasan audit memudahkan saya melakukan pemeriksaan lebih baik					
6.	Auditor berpengalaman lebih ahli dalam mendeteksi adanya kecurangan					
7.	Semakin lama menjadi auditor, saya semakin dapat melakukan prosedur untuk mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh <i>auditee</i>					

Sumber : Novianti (2014)

B. Independence Threats Auditor (X₂)

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
8.	Saya akan independen walaupun memiliki kepentingan keuangan dengan <i>auditee</i>					
9.	Saya berani melaporkan kesalahan klien karena klien dapat mengerti posisi saya dengan auditor lain					
10.	Pada saat evaluasi ulang saya menemukan kesalahan yang material yang dilakukan oleh <i>auditee</i> dan kesalahan tersebut tetap dilaporkan kepada atasan					
11.	Dalam melakukan penugasan audit, saya ikut mempromosikan saham perusahaan dari klien, yang merupakan klien audit					
12.	Saya menolak penugasan audit investigatif bila sedang memiliki hubungan kerjasama dengan pihak <i>auditee</i>					
13.	Dalam melaksanakan tugas saya menolak pemberian <i>auditee</i> yang dapat mempengaruhi keputusan dan pengungkapan					
14.	Saya tidak peduli apakah saya akan dimutasi karena mengungkapkan temuan					

	apa adanya					
15.	Saya sungguh-sungguh dalam melakukan audit, walaupun ada pihak yang memiliki wewenang mengancam untuk menolak pertimbangan yang saya berikan					

Sumber : Novianti (2014)

**C. EFEKTIVITAS PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM
MENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*) (Y)**

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
16.	Auditor melaksanakan telaahan atas pengendalian intern.					
17.	Program audit yang telah disusun mempermudah pembagian tugas bagi tim auditor investigasi.					
18.	Dalam pelaksanaan audit investigasi, auditor dituntut untuk mengembangkan teknik-tekniknya secara tepat.					
19.	Laporan hasil audit investigasi disusun dengan tepat waktu.					
20.	Pihak BPKP melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan kepada penegak hukum.					
21.	Auditor memeriksa fisik dengan menghitung berbagai komponen dalam laporan keuangan.					
22.	Auditor meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada auditee.					
23.	Auditor memeriksa dokumen termasuk informasi yang diolah kemudian disimpan secara elektronik (digital).					
24.	Auditor melaksanakan perhitungan kembali					
25.	Auditor memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan dengan tepat					

Sumber : Feby (2015)

Lampiran 3

FREKUENSI SKOR SETIAP VARIABEL

1. Kompetensi Auditor (X_1)

PERNYATAAN/R ESPONDEN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	JUMLAH
1	5	4	4	5	4	4	4	30
2	4	4	4	4	4	4	4	28
3	5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	4	4	4	4	4	28
5	4	4	4	4	4	4	4	28
6	5	4	4	4	4	4	4	29
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	4	4	5	4	4	4	29
10	5	5	5	5	4	5	5	34
11	4	5	4	5	4	4	4	30
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	5	4	4	5	5	4	31
15	4	5	4	5	5	5	5	33
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	5	5	4	4	4	4	5	31
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	4	4	5	5	4	4	4	30
20	5	5	4	5	4	4	5	32
21	4	5	4	4	4	5	4	30
22	5	4	5	5	4	4	4	31
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	3	4	4	4	3	3	4	25
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	5	5	4	4	4	5	3	30
27	4	4	4	4	4	4	4	28
28	3	4	4	4	4	4	4	27
29	5	5	4	4	4	4	3	29
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	3	4	4	4	4	3	4	26
32	4	4	4	4	4	4	4	28
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	4	4	4	4	4	5	29
35	5	5	4	4	4	4	4	30
36	4	4	4	4	4	4	4	28
37	4	4	4	4	4	4	4	28
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	5	5	4	4	5	4	4	31
40	4	5	4	5	5	5	5	33
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	3	4	3	4	4	4	3	25
43	4	4	4	4	4	4	4	28
44	5	4	5	5	4	4	4	31
45	5	5	4	5	4	5	4	32
46	4	5	4	4	4	5	4	30
47	5	4	5	5	4	4	4	31
48	4	4	4	4	4	4	4	28
49	5	4	4	5	5	4	5	32
50	4	4	4	4	4	4	4	28
51	5	5	4	4	4	4	5	31
52	4	4	4	4	4	4	4	28
53	4	4	4	4	4	4	4	28
54	4	4	3	4	4	4	3	26
55	4	4	4	4	4	4	4	28

2. Independence Threats Auditor (X_2)

PERNYATAAN/ RESPONDEN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	JUMLAH
1	4	4	4	4	4	5	4	5	34
2	4	4	4	4	4	5	5	4	34
3	3	4	4	3	3	4	3	4	28
4	4	5	4	4	4	4	4	4	33
5	5	4	4	5	4	4	4	4	34
6	4	4	4	5	4	4	4	5	34
7	4	4	4	5	4	4	5	4	34
8	5	5	4	5	4	4	4	4	35
9	5	4	5	4	4	4	5	4	35
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	4	5	4	4	5	4	34
12	4	4	4	5	4	4	4	4	33
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
15	4	4	4	5	5	4	4	4	34
16	4	4	4	5	4	4	4	4	33
17	5	4	4	5	5	5	5	4	37
18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	5	4	4	5	5	4	4	4	35
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	4	4	5	5	4	4	5	4	35
23	4	5	4	5	4	4	4	5	35
24	5	4	4	5	5	4	4	4	35
25	4	4	4	4	4	4	4	4	32
26	5	4	4	4	4	5	5	4	35
27	3	4	4	4	4	3	3	4	29
28	4	5	4	4	5	4	5	4	35
29	3	3	3	4	3	3	4	4	27
30	5	4	4	5	4	5	5	4	36
31	4	4	4	4	4	5	5	4	34
32	4	4	5	4	4	4	4	4	33
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	4	4	4	4	4	4	4	4	32
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32
36	5	4	5	5	4	5	5	5	38
37	3	3	3	3	3	3	3	3	24
38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
39	4	4	4	5	4	4	4	4	33
40	5	4	4	5	4	5	4	4	35
41	3	4	4	5	5	4	4	4	33
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	4	4	4	5	5	4	5	4	35
44	5	4	4	5	4	4	5	4	35
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32
46	4	4	4	5	5	4	5	4	35
47	5	4	4	4	5	4	4	4	34
48	4	4	4	4	4	4	4	4	32
49	5	4	4	5	4	5	5	4	36
50	4	4	4	4	4	4	4	4	32
51	5	5	4	4	5	4	5	5	37
52	5	5	5	5	5	5	5	5	40
53	5	4	4	5	4	5	5	4	36
54	4	4	4	5	4	5	5	4	35
55	4	4	5	5	4	4	5	4	35

3. Efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud*) (Y)

PERNYATAAN/ RESPONDEN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	JUMLAH
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	43
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	43
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	47
8	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	43
9	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	37
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
11	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
14	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
15	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	47
16	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	47
17	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	43
18	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	38
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	43
21	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
22	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	42
23	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
24	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	38
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	37
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
29	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	43
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
35	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	47
38	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	42
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
40	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	38
41	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	38
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
43	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	44
44	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	43
45	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	42
46	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
47	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	38
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
49	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	44
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
51	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	38
52	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	44
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
55	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	47

Lampiran 4

HASIL UJI KUALITAS DATA

1. Uji Validitas

a. Kompetensi (X₁)

		Correlations							
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	X1
P1	Pearson Correlation	1	.416**	.399**	.393**	.214	.290*	.219	.709**
	Sig. (2-tailed)		.002	.003	.003	.117	.032	.108	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55
P2	Pearson Correlation	.416**	1	.021	.236	.369**	.630**	.257	.677**
	Sig. (2-tailed)	.002		.879	.083	.006	.000	.058	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55
P3	Pearson Correlation	.399**	.021	1	.521**	-.035	.084	.311*	.514**
	Sig. (2-tailed)	.003	.879		.000	.800	.541	.021	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55
P4	Pearson Correlation	.393**	.236	.521**	1	.273*	.268*	.376**	.689**
	Sig. (2-tailed)	.003	.083	.000		.044	.048	.005	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55
P5	Pearson Correlation	.214	.369**	-.035	.273*	1	.488**	.331*	.561**
	Sig. (2-tailed)	.117	.006	.800	.044		.000	.013	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55
P6	Pearson Correlation	.290*	.630**	.084	.268*	.488**	1	.149	.646**
	Sig. (2-tailed)	.032	.000	.541	.048	.000		.276	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55
P7	Pearson Correlation	.219	.257	.311*	.376**	.331*	.149	1	.599**
	Sig. (2-tailed)	.108	.058	.021	.005	.013	.276		.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55
X ₁	Pearson Correlation	.709**	.677**	.514**	.689**	.561**	.646**	.599**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	55	55	55	55	55	55	55	55

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Independence Threats (X_2)

Correlations									
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	X2
Pearson Correlation	1	.349**	.349**	.452**	.412**	.577**	.526**	.270*	.776**
P1 Sig. (2-tailed)		.009	.009	.001	.002	.000	.000	.046	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Pearson Correlation	.349**	1	.351**	.194	.444**	.230	.236	.512**	.572**
P2 Sig. (2-tailed)	.009		.009	.156	.001	.092	.082	.000	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Pearson Correlation	.349**	.351**	1	.280*	.243	.328*	.407**	.371**	.591**
P3 Sig. (2-tailed)	.009	.009		.038	.074	.015	.002	.005	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Pearson Correlation	.452**	.194	.280*	1	.434**	.329*	.487**	.263	.685**
P4 Sig. (2-tailed)	.001	.156	.038		.001	.014	.000	.052	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Pearson Correlation	.412**	.444**	.243	.434**	1	.204	.366**	.248	.636**
P5 Sig. (2-tailed)	.002	.001	.074	.001		.135	.006	.068	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Pearson Correlation	.577**	.230	.328*	.329*	.204	1	.595**	.338*	.698**
P6 Sig. (2-tailed)	.000	.092	.015	.014	.135		.000	.012	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Pearson Correlation	.526**	.236	.407**	.487**	.366**	.595**	1	.228	.761**
P7 Sig. (2-tailed)	.000	.082	.002	.000	.006	.000		.094	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Pearson Correlation	.270*	.512**	.371**	.263	.248	.338*	.228	1	.549**
P8 Sig. (2-tailed)	.046	.000	.005	.052	.068	.012	.094		.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Pearson Correlation	.776**	.572**	.591**	.685**	.636**	.698**	.761**	.549**	1
X ₂ Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Y
P1	Pearson Correlation	1	.664**	.721**	.217	.118	.502**	.439**	.116	.073	.204	.535**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.111	.391	.000	.001	.399	.595	.136	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P2	Pearson Correlation	.664**	1	.487**	.365**	.211	.249	.600**	.290*	.092	.259	.538**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.006	.122	.067	.000	.032	.504	.056	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P3	Pearson Correlation	.721**	.487**	1	.148	.495**	.732**	.720**	.495**	.394**	.618**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.282	.000	.000	.000	.000	.003	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P4	Pearson Correlation	.217	.365**	.148	1	.412**	.170	.187	.587**	.159	.295*	.472**
	Sig. (2-tailed)	.111	.006	.282		.002	.215	.172	.000	.245	.029	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P5	Pearson Correlation	.118	.211	.495**	.412**	1	.487**	.463**	.638**	.469**	.781**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.391	.122	.000	.002		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P6	Pearson Correlation	.502**	.249	.732**	.170	.487**	1	.527**	.564**	.368**	.538**	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000	.067	.000	.215	.000		.000	.000	.006	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P7	Pearson Correlation	.439**	.600**	.720**	.187	.463**	.527**	1	.620**	.498**	.591**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.172	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P8	Pearson Correlation	.116	.290*	.495**	.587**	.638**	.564**	.620**	1	.534**	.610**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.399	.032	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P9	Pearson Correlation	.073	.092	.394**	.159	.469**	.368**	.498**	.534**	1	.597**	.630**
	Sig. (2-tailed)	.595	.504	.003	.245	.000	.006	.000	.000		.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P10	Pearson Correlation	.204	.259	.618**	.295*	.781**	.538**	.591**	.610**	.597**	1	.828**
	Sig. (2-tailed)	.136	.056	.000	.029	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Y	Pearson Correlation	.535**	.538**	.834**	.472**	.770**	.750**	.797**	.785**	.630**	.828**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Realibilitas

a. Kompetensi (X_1)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.743	.746	7

b. *Independence Threats* (X_2)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.816	.817	8

c. Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.883	.883	10

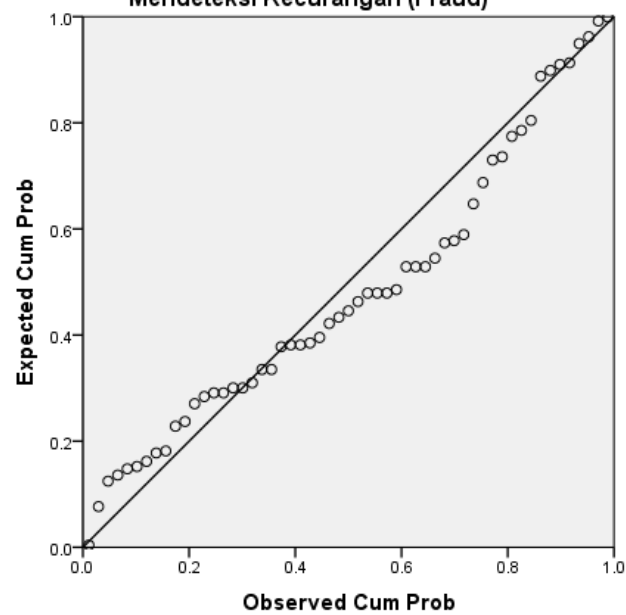
Lampiran 5

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

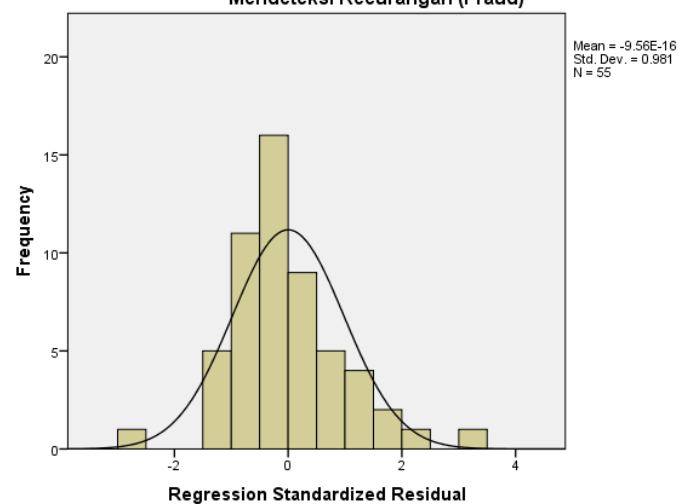
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)



Histogram

Dependent Variable: Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Predicted Value
N			55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		40.7090909
	Std. Deviation		1.21380903
	Absolute		.049
Most Extreme Differences	Positive		.042
	Negative		-.049
Kolmogorov-Smirnov Z			.360
Asymp. Sig. (2-tailed)			.999
	Sig.		.999 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	99% Confidence Interval	Lower Bound	.998
		Upper Bound	1.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

2. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.394 ^a	.155	.122	2.88826	2.215

a. Predictors: (Constant), Independence Threats, Kompetensi

b. Dependent Variable: Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,215, nilai ini lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3, atau dapat disimpulkan bahwa $1 \leq 2,215 \leq 3$, dan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.

3. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

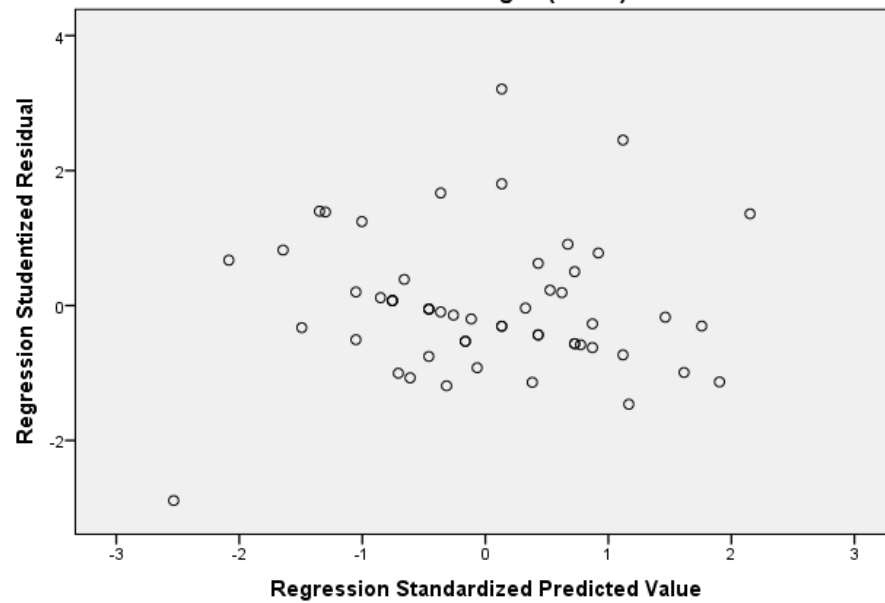
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi	.994	1.007
	Independence Threats	.994	1.007

a. Dependent Variable: Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

4. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)



Lampiran 6

HASIL UJI HIPOTESIS

1. Uji R

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.394 ^a	.155	.122	2.88826

a. Predictors: (Constant), Independence Threats, Kompetensi

b. Dependent Variable: Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

2. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.298	7.804		2.217	.031
	Kompetensi	.418	.206	.260	2.030	.048
	Independence Threats	.360	.145	.318	2.484	.016

a. Dependent Variable: Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

3. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79.560	2	39.780	4.769	.013 ^b
	Residual	433.786	52	8.342		
	Total	513.345	54			

a. Dependent Variable: Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

b. Predictors: (Constant), Independence Threats, Kompetensi